

# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**MAKASSAR 2021**



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 1679 / VII / TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan untuk selanjutnya diverifikasi dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) selanjutnya telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 15)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- KESATU** : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, tercantum dalam dokumen tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Makassar  
pada tanggal : 19 Juli 2021

**Pjt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**



**ANDI SUDIRMAN SULAIMAN**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Tempat.
3. Peninggal.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga dapat diselesaikannya “**Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022**” sebagai acuan dalam perencanaan pelaksanaan program kegiatan dan penyusunan KUA PPAS Tahun 2022.

Rencana Kerja ini disusun untuk menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2022 dan menjadi kontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan terutama pada sektor perikanan dan kelautan. Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, baik dari stakeholder dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja ini dapat terselesaikan, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga Renja ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, Juni 2021

Plt. KEPALA DINAS



Ir. HARDI, MM

Pangkat Pembina Tk. I

NIP. 19650816 199403 1 008

## DAFTAR ISI

Halaman Judul <b>SK Penetapan</b>	<i>Halaman</i>
<b>A. KATA PENGANTAR</b> .....	<i>i</i>
<b>B. DAFTAR ISI</b> .....	<i>ii</i>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU</b> .....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	51
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	55
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	56
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	89
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	121
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	121
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	122
3.3. Program dan Kegiatan.....	126
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD</b> .....	148
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	175

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Rencana Kerja (RENJA) Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 disusun sebagai langkah perjalanan dari awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat visi, misi dan tujuan, kebijakan, program, kegiatan pembangunan untuk lima tahun mendatang dengan mengacu pada sistem perencanaan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri 86 Tahun 2017 dan Sistem Pengelolaan Perikanan dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 dan perubahan Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Rencana Kerja Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 diarahkan sebagai perwujudan visi misi pemerintah daerah periode 2018-2023 dimana disusun melalui proses sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan

penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana dalam menghadapi era globalisasi, desentralisasi serta diposisikan sebagai tahapan penguatan, perluasan, pendalaman dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, utamanya dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
5. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
7. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah );
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 243);
  18. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Sulawesi Selatan;
  19. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1),
  20. Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.
  21. Keputusan Gubernur No. 15 Tahun 2021 tentang Pengesahan Renstra Perubahan OPD tahun 2018-2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Renja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah, (1) untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategis dengan skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, (2) sebagai acuan pelaksanaan pembangunan

bidang Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, (3) mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan,

### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 adalah (1) tersedianya dokumen perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, (2) sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan pembangunan Perikanan dan Kelautan Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dalam bentuk sasaran, strategis, kebijakan dengan memperluas cakupan sesuai pelaksanaan Reformasi Birokrasi, (3) untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2022. Program dan kegiatan sebagai tujuan pembangunan Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan dapat diwujudkan sesuai visi dan misinya. (4) sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2021 dan tahun berjalan tahun 2022, dan perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN,**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan meliputi :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD,** memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD,** berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008 (jika ada). Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika perangkat daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD,** berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**  
Berisikan uraian proses tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, rumusan program kegiatan yang baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.** Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung

dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD
- 3.3. Program dan Kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, seperti pencapaian Visi dan Misi kepala daerah, pencapaian SDGS, Pengentasan Kemiskinan, Pencapaian NSPK dan SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah kemudian rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi jumlah program dan kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. Kemudian penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya dan dituangkan pada tabel rencana program.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,**

Menguraikan tentang Rencana Kerja dengan pendanaan yang sesuai

### **BAB V PENUTUP,**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN**  
**RENJA TAHUN LALU**

**II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja (Tahun 2021 hingga Triwulan II)**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 Triwulan II dan identifikasi faktor-faktor yang mendukung pencapaian target maupun hambatan/kendala yang menyebabkan pencapaian target per triwulan belum tercapai. Evaluasi kinerja didasarkan penjabaran dari sasaran strategis Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Periode 2018-2023 yaitu Sasaran Strategis Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 :

- a. Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun 2021
- b. Evaluasi Capaian Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja jangka pendek tahun 2021

Evaluasi anggaran yang sudah berjalan pada Triwulan I s.d II Tahun 2021 bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi anggaran terhadap kegiatankegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Alokasi APBD Murni Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan Total Pagu Anggaran sebesar Rp. 88.973.299.614.46 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 71.832.575.782.46 dan Belanja Modal sebesar Rp. 17.140.723.832,-. Rincian alokasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dan prakiraan Capaian tahun 2021  
Tabel T-C.29 sesuai lampiran Permendagri 86 tahun 2017 Permendagri 13 tahun 2006

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d RKPD TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD) TAHUN 2020	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN					
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020 (TAHUN BERJALAN)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
2		Urusan Pilihan												
2	8	Kelautan dan Perikanan												
2	8	1	Dinas Kelautan dan Perikanan											
2	8	1	1	PROGRAM HILIRISASI PERIKANAN (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan (Prioritas) (Rp. Trilyun)	104.16	0	18.85	24.4	129.44	19.79	44.19	42%	
2	8	1	1	1	Diseminasi Inovasi Teknologi Budidaya Udang Windu Berbasis Kawasan (SITTO BANGKIT)	Jumlah Inovasi Teknologi Budidaya Udang Windu Berbasis Kawasan	500	0	100	100	100%	100	200	40%
2	8	1	1	6	Inovasi Teknologi Usaha Perikanan Budidaya dalam rangka Pengembangan Komoditas unggulan dan komoditas perikanan lainnya	Jumlah inovasi teknologi usaha perikanan budidaya Komoditas Unggulan dan komoditas perikanan lainnya	500	0	120	100	83%	120	220	44%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d RKPD TAHUN 2018	KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD) TAHUN 2020	TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN					
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020 (TAHUN BERJALAN)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
2	8	1	1	9	Inovasi Teknologi pengembangan usaha Garam	Jumlah Inovasi Teknologi pengembangan usaha garam	180	0	35	1	3%	35	36	20%
2	8	1	1	3	Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fasilitas fungsional Pelabuhan Perikanan (UPT Provinsi) (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan yang terbangun	25	0	5	3	60%	5	8	32%
2	8	1	1	6	Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD-Provinsi) dan Percontohan Budidaya Laut (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana pokok unit budidaya yang terbangun	8	0	8	9	110%	0	0	110%
					Jumlah percontohan budidaya laut	160	0	40	0	0	0	40	48	30%
2	8	1	1	8	Pengadaan sarana dan prasarana usaha garam (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana usaha garam yang dibangun	65	0	16	1	6%	16	17	26%
2	8	1	1	9	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Peningkatan Kapasitas Nelayan	Jumlah kapal yang dibangun	117	0	15	5	33%	15	20	17%
					Jumlah sarana dan prasarana alat tangkap	755	0	150	29	19%	150	179	24%	
					Jumlah alat bantu tangkap	2,200.00	0	100	40	40%	100	140	6%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d RKPD TAHUN 2018	KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD TAHUN 2020)	TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN					
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020 (TAHUN BERJALAN)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
2	8	1	1	2	3	Penguatan pola kemitraan dan promosi produk	13	0	2	5	250%	2	7	54%
						Jumlah promosi yang diikuti	7	0	1	2	200%	1	3	43%
2	8	1	1	2	6	Inovasi Teknologi Produk Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan konsumsi dan non konsumsi	201	0	50	1	2%	50	51	25%
2	8	1	1	3	2	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan dan Pengolahan Hasil Perikanan	100	0	20	20	100%	20	40	40%
						Jumlah usaha pengolahan yang mendapatkan pengawasan	500	0	100	100	100%	100	200	40%
2	8	1	1	3	3	Rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan Hasil Perikanan (DAK)	40	0	0	0	0	10	10	25%
						Jumlah bantuan peralatan pengolahan	40	0	0	0	0	10	10	25%
						Jumlah perbaikan bangunan pengolahan unit pengolahan ikan skala mikro dan skala kecil	20	0	0	0	0	5	5	25%
2	8	1	1	3	4	Pengelolaan unit perbenihan yang sesuai standar mutu	40	0	8	8	0	8	16	40%
						Jumlah pengendalian kualitas lingkungan perikanan budidaya perbenihan	32	0	8	8	0	8	16	50%
						Jumlah sarana dan prasarana perbenihan yang dioperasikan	3,750.00	0	750	750	0	750	1,500.00	40%
						Jumlah induk unggul yang untuk menghasilkan benih								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKA T DAERAH)	TARGET KINERJA HASIL PROGRA M DAN KELUARA N KEGIATA N s/d RKPD TAHUN 2018	KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD TAHUN 2020)	TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN					
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISA SI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020 (TAHUN BERJALAN)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
2	8	1	2	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah produksi perikanan tangkap	1,904,410.40	0	369,365.00	430,763.40	117%	374,981.00	805,744.40	42%	
					Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	28,022,974.7 6	0	4,656,858. 00	3,657,569.50	79%	5,088,024.00	8,745,593.50	31%	
					Jumlah produksi garam rakyat	503,808.52	0	91,176.69	126,923.00	139%	95,735.52	222,658.52	44%	
2	8	1	2	2 4	Pengelolaan pelabuhan perikanan dalam rangka optimalisasi produksi	Jumlah Layanan Operasional di pelabuhan perikanan wilayah 2	25	0	5	5	100	5	10	40%
					Jumlah Layanan Operasional pelabuhan perikanan wilayah 1	25	0	5	5	100	5	10	40%	
2	8	1	2	2 5	Koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi Kelautan dan Perikanan	Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi Garam	288.00	0	80	80	100	100	180	63%
						Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi olahan	504.00	0	100.00	100	100	100.00	200	40%
						Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan budidaya	504.00	0	200.00	200		100.00	300	60%
						Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan tangkap	504.00	0	150.00	150		100.00	250	50%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d RKPd TAHUN 2018	KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD TAHUN 2020)	TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN					
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020 (TAHUN BERJALAN)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
2	8	1	3	PROGRAM PENERAPAN MUTU, PENGEMBANGAN USAHA DAN DAYA SAING	Volume ekspor produk KP (ton)	877,213.80	0	143,685.41	152,031.90	105.81%	158,053.95	310,085.85	35.35%	
					Nilai ekspor produk KP (US\$.1000)	2,285,929.16	0	374,429.44	320,047.89	85.48%	411,872.38	731,920.27	32.02%	
					Jumlah Produksi Olahan Konsumsi dan Non Konsumsi (ton)	148,811.93	0	26,931.21	25,077.00	93.12%	28,277.77	53,354.77	35.85%	
2	8	1	3	5	Layanan pengujian Laboratorium dalam rangka pemenuhan standar mutu produk dan pemasaran	Jumlah sampel Produk Yang dilakukan pengujian mutu	500	0	100	100	100.00%	100	200	40%
					Jumlah layanan pemenuhan standar mutu	500	0	100	100	100.00%	100	200	40%	
2	8	1	3	7	Pembinaan Daya Saing Hasil Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Produktif dan Kompetitif serta Sertifikasi Kelayakan Pengolah	Jumlah unit usaha pengolah yang mendapatkan pembinaan daya saing	300	0	70	70	100.00%	70	140	47%
2	8	1	3	10	Penetapan standar produk perikanan untuk memenuhi persyaratan ekspor	Dukungan Fasilitas Persyaratan sertifikasi produk hasil perikanan	300	0	70	0	0	70	70	23%
						Dukungan Fasilitas Persyaratan sertifikasi perikanan tangkap	125	0	25	0	0	25	25	20%
						Dukungan Fasilitas Persyaratan sertifikasi perikanan budidaya	125	0	25	0	0	25	25	20%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d RKPD TAHUN 2018	KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD) TAHUN 2020	TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN						
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020 (TAHUN BERJALAN)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)					
2	8	1	4	PROGRAM PENGAWASAN, KONSERVASI, PENATAAN DAN REHABILITASI PESISIR DAN LAUT	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ribu Ha )	5,060,180.38	0	941,210.88	1,001,941.71	106%	1,008,321.53	2,010,263.24	40%		
					% Penurunan tindakan IUU Fishing	36.76	0	9.83	9.83	100%	8.03	17.86	49%		
					Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	100	0	20	15	75%	20	35	35%		
2	8	1	4	1	Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	37	0	5	5	100%	5	10	27%	
2	8	1	4	2	Pembangunan/Rehabilitasi prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan prasarana di Pulau-Pulau Kecil (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana Kawasan Konservasi Perairan daerah	22	0	5	5	100%	5	10	45%	
					Jumlah prasarana pulau-pulau kecil	26	0	6	6	100%	6	12	46%		
2	8	1	4	3	1	Pengawasan Terpadu SDKP	Jumlah Peserta Koordinasi teknis Pengawasan dan pengendalian SDKP	480	0	120	120	100%	120	240	50%
						Jumlah Pokmasas yang diberdayakan	120	0	30	30	100%	30	60	50%	
						Jumlah Pengawasan Biota Laut yang dilindungi	12	0	3	3	100%	3	6	50%	
2	8	1	4	3	8	Pengelolaan kawasan konservasi, perairan P3K dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan	Jumlah rehabilitasi ekosistem sumberdaya KP	168	0	42	25	60%	42	67	40%
						Jumlah pengelolaan dan pembinaan pantai berseri	28	0	7	7	100%	7	14	50%	
						Jumlah Tambatan Perahu didaerah pesisir yang dibangun	20	0	5	5	100%	5	10	50%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	TARGET KINERJA HASIL PROGRAM M DAN KELUARA N KEGIATA N s/d RKPD TAHUN 2018	KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD TAHUN 2020	TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN						
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISAS I (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020 (TAHUN BERJALAN)	TINGKAT CAPAIAN REALISAS I TARGET RENSTRA (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)					
2	8	1	4	3	9	Penataan dan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi dan penataan ruang laut dan pulau-pulau kecil	Jumlah Peserta koordinasi teknis konservasi kawasan dan penataan ruang laut pesisir dan p3k	480	0	120	120	100%	120	240	50%
						Jumlah penetapan pencadangan kawasan konservasi		12	0	3	3	100%	3	6	50%
						Jumlah regulasi konservasi dan penataan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil		4	0	1	1	100%	1	2	50%
						Jumlah dokumen rencana pengelolaan dan rencana aksi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil		4	0	1	1	100%	1	2	50%
2	8	1	4	4	0	Pengawasan IUU fishing dan pemantauan kapal perikanan	Pengawasan IUU fishing dan pemantauan kapal perikanan	28	0	7	7	100%	7	1	4%
2	8	1	#			<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>40%</b>
2	8	1	#	1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	60	0	12	12	100%	12	24	40%
2	8	1	#	2		Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	120	0	24	24	100%	24	48	40%
							Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	120	0	24	24	100%	24	48	40%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d RKPD TAHUN 2018	KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD) TAHUN 2020	TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020 (TAHUN BERJALAN)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 8 1 5 0 3	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	740	0	148	148	100%	148	296	40%
2 8 1 5 0 5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	150	0	30	30	100%	30	60	40%
2 8 1 5 0 8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	10	0	2	2	100%	2	4	40%
2 8 1 5 0 9	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	20	0	4	4	100%	4	8	40%
2 8 1 5 0 10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	665	0	133	35	26%	133	168	25%
2 8 1 5 1	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>40%</b>
2 8 1 5 1 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara	10	0	2	2	100%	2	4	40%
2 8 1 5 1 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	35	0	7	7	100%	7	14	40%
2 8 1 5 1 6	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	70	0	14	14	100%	14	28	40%
2 8 1 5 1 7	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	100	0	20	20	100%	20	40	40%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d RKPD TAHUN 2018	KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD) TAHUN 2020	TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020 (TAHUN BERJALAN)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 8 1 5 1 8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	10	0	2	2	100%	2	4	40%
2 8 1 5 1 9	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	300	0	60	60	100%	60	120	40%
2 8 1 5 1 0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	50	0	10	10	100%	10	20	40%
2 8 1 5 1 2	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	4 280	0 0	1 70	1 70	100% 100%	1 70	2 140	50% 50%
2 8 1 5 2	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>	<b>% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>40%</b>
2 8 1 5 2 2	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	20 10 2 20	0 0 0 0	4 2 0 4	4 2 0 4	100% 100% 0% 100%	4 2 1 4	8 4 1 8	40% 40% 50% 40%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d RKPd TAHUN 2018	KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD) TAHUN 2020	TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020 (TAHUN BERJALAN)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
281524	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	10	0	2	2	100%	2	4	40%
		Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	30	0	6	6	100%	6	12	40%
281525	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	30	0	6	6	0%	6	12	40%
28153	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>% ASN berkinerja sangat baik</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	0%	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>40%</b>
281531	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya	1,050.00	0	210	210	0%	210	420	40%
		Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	40	0	8	8	0%	8	16	40%
281532	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	1,050.00	0	210	0	0%	210	210	20%



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
																8 = 7/6
1	2					3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4		
3	2	0.00.0.00.3	3.25.0	3.25.02.1		3.25.02.1.03 PEMBERDAYAAN Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah unit usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan	Kelompok	72.0	0.0	0.0	7.0	68.13	7.0	9.72	26.07
	5	8.0000	2	.03			Jumlah sarana dan prasarana masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Unit	3.0	0.0	0.0	1.0		1.0	33.33	
3	2	0.00.0.00.3	3.25.0	3.25.02.1	0	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Sarana Inovasi Teknologi Usaha Masyarakat Pesisir	Unit	30.0	6.0	0.0	0.0	0.0	4.0	10.0	33.33
	5	8.0000	2	.03	1		Jumlah sarana dan prasarana usaha garam	Unit	30.0	2.0	1.0	1.0	100.0	7.0	10.0	28.59
3	2	0.00.0.00.3	3.25.0	3.25.02.1	0	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi garam	Orang	2,160.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	180.0	8.33
	5	8.0000	2	.03	4	Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan usaha alternatif masyarakat pesisir berbasis inovasi	Kelompok	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	100.0
						Rata-Rata Capaian Kinerja %)							20.33		7.22	0.0
						Predikat Kinerja										
3	2	0.00.0.00.3	3.2			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	%	78.95	0.0	0.0	0.0	0.0	57.89	57.89	73.32
	5	8.0000	5.03				Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp. M	44,398.86	8,631.28	8,675.44	8,678.90	100.04	8,852.48	26,162.66	58.93
							Produksi perikanan tangkap	Ton	2,002,572.90	398,565.30	396,992.30	389,208.20	98.04	396,992.30	1,184,765.80	59.16
							Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	131.45	17.52	20.06	6.68	33.30	23.89	48.09	36.58
							Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	%	124.15	43.81	24.46	12.89	52.7	25.61	82.31	66.30
3	2	0.00.0.00.3	3.2	3.25.03		3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan Mil	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	744.0	0.0	0.0	8.0	25.61	8.0	1.08	6.10
	5	8.0000	5.03	.1.01			Jumlah nelayan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah	Orang	591.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3	2	0.00.0.00.3	3.2	3.25.03	0	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kapal yang dibangun	Unit	42.0	28.0	0.0	0.0	0.0	13.0	41.0	97.62
	5	8.0000	5.03	.1.01	2											

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKA T DAERAH) TAHUN 2018-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN					
					TARGET RENJA PERANG KAT DAERAH TAHUN 2020	REALISA SI RENJA PERANG KAT DAERAH TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021)	TINGKAT CAPAIAN REALISA SI TARGET RENSTR A (%)				
					6	7	8 = 7/6				9	10 = 5+7+9	11 = 10/4	
3 2 5	0.00.0.00.3 8.0000	3 .2 5. 04												
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai produksi perikanan budidaya Produksi perikanan budidaya Persentase ketersediaan benur berkualitas	Rp. M Ton %	28,500.0 14,856.34		14,474.73 12,119.87	73.12	12,119.87	39,096.08	137.179				
				3,949.572, 33 300.0	0.0 0.0	3,898,7 67.40 100.0		3,059,697.7 0 80.89	0.0 0.0					
3 2 5	0.00.0.00.3 8.0000	3.25 .04	3.25.04.1. 05											
	3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut Jumlah produksi benur yang berkualitas Jumlah areal pengelolaan pembudidayaan ikan	Unit Ekor Ha	90,000,000 .0 3,390.0 397.0	0.0 0.0 0.0	0.0 17,391, 000.0 0.0 226.0	73.12	17,391,000. 0 130.0 226.0	19.32 3.83 56.93	31.53				
3 2 5	0.00.0.00.38. 0000	3.25 .04	3.25.04.1. 05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kebun laut yang tersedia Jumlah sarana prasarana budidaya laut	Unit Unit	7.0 390.0	0.0 0.0	0.0 0.0	45.72	0.0 118.0	0.0 30.26	8.18
3 2 5	0.00.0.00.3 8.0000	3. 25 .0 4	3.25.04 .1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah induk unggul untuk menghasilkan benih	Ekor	2,250.0	0.0	0.0	10,000. 0	69.88	10,000.0	444.44 29.61
3 2 5	0.00.0.00.3 8.0000	3. 25 .0 4	3.25.04 .1.05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Kualitas Lingkungan Perikanan Budidaya Perbenihan	Unit	39.0	0.0	0.0	10.0	55.50	10.0	25.64 10.62
3 2 5	0.00.0.00.3 8.0000	3.25 .0 4	3.25.04 .1.05	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	3.0	0.0	0.0	0.0	88.47	0.0	0.0 13.83
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						11.29		81.29	0.0
					Predikat Kinerja									

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN			
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)		
1	2					3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4		
3	2	0.00.0.0	3.2			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	0.0	0.0	87.48	71.57	75.03	71.57	0.0	1,088.89
3	2	0.00.0.0	3.2	3.25.05		3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan Mil	Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Jumlah unit usaha yang mendapatkan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yaitu pengawasan biota laut , pengawasan dokumen kapal, pengawasan aktivitas penangkapan ikan	Unit Unit	100.0 27.0	0.0 0.0	0.0 0.0	26.0 104.0	75.03	26.0 104.0	26.0 385.19	2,214.60
3	2	0.00.0.0	3.2	3.25.05.1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan Mil	Jumlah jenis Biota laut yang dilindungi Jumlah peserta koordinasi teknis pengawasan dan pengendalian SDKP Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan Jumlah laporan pengawasan terpadu	Jenis Orang Kelompok Laporan	3.0 360.0 90.0 3.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 20.0 0.0	96.27	1.0 0.0 20.0 0.0	33.33 0.0 22.22 0.0	47.75
3	2	0.00.0.0	3.2	3.25.05.1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan Mil	Jumlah sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Jumlah peserta sosialisasi dan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi wilayah bosowasi Jumlah usaha perikanan tangkap yang mendapatkan Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan wilayah ajatappareng	Unit orang unit	100.0 300.0 21.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.0 0.0 20.0	74.75	19.0 0.0 20.0	19.0 0.0 95.24	
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							21.38		18.87	0.0
						Predikat Kinerja										

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANG KAT DAERAH) TAHUN 2018-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANG KAT DAERAH TAHUN 2021)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANG KAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN			
									TARGET RENJA PERANG KAT DAERAH TAHUN 2020	REALISASI RENJA PERANG KAT DAERAH TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)		
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4		
3	25	0.00.0.0 0.38.0000	3.25. 06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi Persentase Pembinaan mutu produk perikanan Nilai Hilirisasi Produksi olahan Ikan konsumsi dan non konsumsi	Ton % Milyar	0.0 100.0 317.28	0.0 0.0 0.0	7,05 1.70 60.0 304. 96	2,373.50 50.48 19.13	89.31	2,373.50 50.48 19.13	0.0 50.48 6.03	20.16
3	25	0.00.0.0 0.38.0000	3.25. 06	3.25. 06.1.02		3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang berdayasaing Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Unit Unit usaha	210.0 300.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	89.31	0.0 0.0	0.0 0.0	20.86
3	25	0.00.0.0 0.38.0000	3.25. 06	3.25. 06.1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Inovasi Teknologi Produk Olahan Hasil KP Konsumsi dan Non Konsumsi Jumlah promosi yang diikuti Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi olahan Jumlah sarana prasarana pengolahan sesuai standar usaha Jumlah Unit Usaha Pengolah Yang Mendapatkan Pengembangan mutu produk	Jenis Produk Inovasi Kegiatan promosi Orang Unit UPI	12.0 6.0 180.0 3.0 210.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	50.19	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	8.79
3	25	0.00.0.0 0.38.0000	3.25. 06	3.25. 06.1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan Fasilitas Pemantauan dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha Pengolah Yang Mendapatkan Pengembangan mutu produk Jumlah Sampel Produk yang Dilakukan Pengujian Mutu Jumlah validasi sarana prasarana laboratorium pengujian Jumlah laporan penerapan prosedur mutu	UPI Hasil uji Mutu Unit Jenis	300.0 300.0 12.0 3.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 786.0 1.0 0.0	93.98	0.0 786.0 1.0 0.0	0.0 262.0 8.33 0.0	22.86
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							36.05		30.04	0.0
						Predikat Kinerja										

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4	
3	2	0.00.0.00.38.0000	X.X X.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah %	100.0	0.0	100.0	40.07	86.31	40.07	40.07	29.27
	5						Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik %	100.0	0.0	100.0	75.0		75.0	75.0	
							Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP %	10.53	0.0	8.70	51.10		51.10	485.28	
3	2	0.00.0.00.38.0000	X.X X.01	X.XX.0 1.1.01		X.XX.01.1.01 XXX Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	21.0	0.0	0.0	7.0	69.86	7.0	33.33	30.16
3	2	0.00.0.00.38.0000	X.X X.01	X.XX.0 1.1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	45.0	0.0	0.0	15.0	67.59	15.0	33.33	38.75
3	2	0.00.0.00.38.0000	X.X X.01	X.XX.0 1.1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	144.0	0.0	0.0	26.0	65.13	26.0	18.06	27.65
3	2	0.00.0.00.38.0000	X.X X.01	X.XX.0 1.1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	90.0	0.0	0.0	31.0	30.67	31.0	34.44	29.82
3	2	0.00.0.00.38.0000	X.X X.01	X.XX.0 1.1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	30.0	0.0	0.0	0.0	25.76	0.0	0.0	8.72
3	2	0.00.0.00.38.0000	X.X X.01	X.XX.0 1.1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	90.0	0.0	0.0	20.0	29.50	20.0	22.22	12.54
3	2	0.00.0.00.38.0000	X.X X.01	X.XX.0 1.1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	30.0	0.0	0.0	9.0	77.43	9.0	30.0	31.83
							Jumlah data dan Informasi	6.0	0.0	0.0	6.0		6.0	100.0	
							Jumlah Data Yang Dipublikasikan	18.0	0.0	0.0	6.0		6.0	33.33	
3	2	0.00.0.00.38.0000	X.X X.01	X.XX.0 1.1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.0	0.0	0.0	9.0	58.20	9.0	25.0	9.54
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					7.23		32.93	0.0
							Predikat Kinerja								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
										TARGET RENJANG PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	REALISASI RENJANG PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021)	TINGKAT CAPAIAN TARGET RENSTRA (%)	
																8 = 7/6
1	2					3		4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4	
3	25	0.00.0.00.38.0000	X.X X.01	X.XX.01.1.02		X.XX.01.1.02 XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Laporan	178.0	0.0	0.0	33.0	96.11	33.0	18.54	27.72
3	25	0.00.0.00.38.0000	X.X X.01	X.XX.01.1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Gaji dan Tunjangan ASN yang terkoordinasi dan tepat waktu	Laporan	36.0	0.0	0.0	9.0	96.15	9.0	25.0	27.74
3	25	0.00.0.00.38.0000	X.X X.01	X.XX.01.1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan	Laporan	36.0	0.0	0.0	9.0	100.0	9.0	25.0	49.28
3	25	0.00.0.00.38.0000	X.X X.01	X.XX.01.1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dilaksanakan dan telah terkoordinasi	Laporan	3.0	0.0	0.0	0.0	78.41	0.0	0.0	24.47
3	25	0.00.0.00.38.0000	X.X X.01	X.XX.01.1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan dan dikelola	Laporan	3.0	0.0	0.0	1.0	74.09	1.0	33.33	16.21
3	25	0.00.0.00.38.0000	X.X X.01	X.XX.01.1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun dan telah terkoordinasi	Laporan	54.0	0.0	0.0	13.0	79.05	13.0	24.07	24.98
						<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>						10.69		13.43	0.0	
						<i>Predikat Kinerja</i>										
3	25	0.00.0.00.38.0000	X.X X.01	X.XX.01.1.05		X.XX.01.1.05 XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	%	275.0	0.0	0.0	50.0	73.47	50.0	100.0	36%
3	25	0.00.0.00.38.0000	X.X X.01	X.XX.01.1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan administrasi kepegawaian yang dikelola	Laporan	36.0	0.0	0.0	9.0	100.0	9.0	18.0	50%
3	25	0.00.0.00.38.0000	X.X X.01	X.XX.01.1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data sistem informasi kepegawaian yang telah dikoordinasi	Laporan	36.0	0.0	0.0	9.0	75.47	9.0	18.0	50%
3	25	0.00.0.00.38.0000	X.X X.01	X.XX.01.1.05	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Laporan	36.0	0.0	0.0	9.0	58.24	9.0	18.0	50%
						<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>						9.74		18.0	50%	
						<i>Predikat Kinerja</i>										

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	REALISASI RENJAKAT DAERAH TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)		10 = 5+7+9	11 = 10/4	
1						2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4	
3	25	0.00.0.0 0.38.000 0	X.X X.01	X.XX. 01.1. 09		X.XX.01.1.09 XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Unit	175.0	0.0	0.0	15.0	48.74	15.0	30.0	17%
3	25	0.00.0.0 0.38.000 0	X.X X.01	X.XX. 01.1. 09	X.XX. 01.1. 09.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan bebas pajak	unit	45.0	0.0	0.0	15.0	48.71	15.0	30.0	67%
3	25	0.00.0.0 0.38.000 0	X.X X.01	X.XX. 01.1. 09	X.XX. 01.1. 09.02	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang terpelihara dan bebas pajak	unit	45.0	0.0	0.0	2.0	95.50	2.0	4.0	9%
3	25	0.00.0.0 0.38.000 0	X.X X.01	X.XX. 01.1. 09	X.XX. 01.1. 09.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			13.0	0.0	0.0	1.0	44.43	1.0	2.0	15%
						<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>							10.48		0.0	0.0
						<i>Predikat Kinerja</i>										

### **II.1.1 Realisasi Program/kegiatan yang tidak mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .**

Kinerja program /kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja tingkat capaian realisasi Renstra tahun 2021 adalah pada level Program yang tidak mencapai target adalah program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Cakupan Bina Kelompok Nelayan yang baru mencapai 48.09%.

Kemudian pada level kegiatan yang tidak mencapai target kinerja tingkat capaian realisasi Renstra adalah

1. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi dengan indikator kinerja Jumlah Regulasi Konservasi dan Penataan Ruang Laut yang baru mencapai 11,11%

Dengan Sub kegiatan :

- a. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi (unit) baru mencapai 27,49%
  - b. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan PulauPulau Kecil dengan indikator kinerja Jumlah Rehabilitasi ekosistem Laut baru mencapai 28,6%
2. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan PulauPulau Kecil dengan indikator kinerja Jumlah unit usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan baru mencapai 19,4%

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan PulauPulau Kecil dengan indikator kinerja Jumlah Sarana Inovasi Teknologi Usaha Masyarakat Pesisir baru mencapai 33,33%

### **II.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (nilai sama)**

Kinerja program /kegiatan yang memenuhi target kinerja tingkat capaian realisasi Renstra tahun 2021 (nilai sama) adalah pada level Program yang mencapai target adalah program Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dengan indikator kinerja Persentase Pembinaan mutu produk perikanan yang telah mencapai 60%.

Kemudian pada level kegiatan yang tidak mencapai target kinerja tingkat capaian realisasi Renstra adalah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Bimbingan Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing dengan indikator kinerja Jumlah Sarana Inovasi Teknologi Usaha Masyarakat Pesisir baru mencapai 33,33%

### **II.1.3 Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .**

Kinerja program /kegiatan yang melebihi target kinerja tingkat capaian realisasi Renstra tahun 2021 adalah pada level Program yang melebihi target adalah program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Cakupan Bina Kelompok Nelayan yang baru mencapai 48.09%.

Kemudian pada level kegiatan yang tidak mencapai target kinerja tingkat capaian realisasi Renstra adalah :

1. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi dengan indikator kinerja Jumlah Regulasi Konservasi dan Penataan Ruang Laut yang baru mencapai 11,11%

### **II.1.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/ Kegiatan**

**Program Prioritas :**

- 1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

**Indikator Program :**

- a. **Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2021 sebesar Rp. 8.852,48 M pada triwulan II telah mencapai Rp. 4.463,61 M**
- b. **Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2021 sebesar 396.992,3 ton pada triwulan II telah mencapai 187.500,2 ton**
- c. **Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional tahun 2021 sebesar 57,89% pada triwulan II belum ada data**

- d. Cakupan Bina Kelompok Nelayan pada tahun 2021 sebesar 23,89% pada triwulan II telah mencapai 12.10%**
- e. Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan pada tahun 2021 sebesar 25,61% pada triwulan II belum ada data**

Pada tahun 2021 Program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 26.519.004.784 dan pada triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 1.684.203.125,- dengan capaian kinerja keuangan 6,35% dan fisik 14,83% meliputi kegiatan :

**1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
  - b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- 2. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
  - b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- 3. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan perikanan Provinsi**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
- c. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan tabel diatas bahwa Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan sampai Tahun ini (Tahun 2021)

**2. Program Perikanan Budidaya :**

**Indikator Program :**

- a. Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Budidaya tahun 2021 Rp. Rp. 14.474,73 M pada triwulan II telah mencapai Rp. 11.542.73 M atau 79.74%**
- b. Produksi Perikanan Budidaya tahun 2021 sebesar 3.898.767,4 ton pada triwulan II telah mencapai 2.776.775.1 ton atau 71,22%**
- c. Persentase ketersediaan benur berkualitas 100% pada triwulan II telah mencapai 70%**

Pada tahun 2021 Program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 19.640.016.764,- dan pada triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 1.617.860.100,- dengan capaian realisasi keuangan 8,24% dan fisik 24,36%. Program ini diarahkan untuk mendukung keberhasilan pengembangan komoditas unggulan yaitu udang windu dan rumput laut serta komoditas ikan lainnya dimana dibutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan yang diatur dalam UU 23 tahun 2014. Pemerintah provinsi selaku Pembina antar kabupaten/kota akan efektifkan fungsi koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi. Adapun dukungan kegiatannya adalah sebagai berikut :

Program ini meliputi kegiatan :

1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- b. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- d. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- e. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- f. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Program kegiatan ini adalah kelompok prioritas yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan dimana indikatornya fokus pada nilai hilirisasi produk. Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi dan optimalisasi hilirisasi produk untuk mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu Pengembangan Hilirisasi Komoditas Unggulan yaitu **udang windu** dan **rumput laut** dengan melakukan Diseminasi teknologi dan Inovasi berbasis kawasan sampai tahun 2023. Adapun tujuan program adalah (1) Peningkatan Pendapatan, (2) Penyerapan Tenaga Kerja melalui usaha perikanan budidaya, 3) Pemulihan ekonomi pasca bencana alam dan pandemik global.

Pada tahun 2021 dilakukan studi kelayakan terkait budidaya laut (*marine culture*) yang ramah lingkungan dan diharapkan dapat diterapkan di beberapa kabupaten/kota pada tahun 2022 dan 2023. Selain itu Program tersebut diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri strategis perikanan di Sulawesi Selatan dengan prioritas usaha adalah agroindustri dan industri yang memiliki keterkaitan industri/pasar didaerah lain termasuk luar negeri, melalui usaha ini akan memicu laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.

Dalam rangka pencapaian target kinerja maka implementasi program, kegiatan dan subkegiatan maka pada tahun 2021 diarahkan pada:

- a. Diseminasi pengembangan inovasi teknologi budidaya udang windu berbasis Kawasan dan ramah lingkungan dengan kluster pengembangan terbagi atas 3 kluster yaitu 1) Kluster I : Pinrang, Bone, Maros, Takalar, Pangkep, 2) Kluster II : Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Jeneponto, Bulukumba, 3) kluster III : Wajo, Barru, Makassar, Palopo.
- b. Pengembangan budidaya rumput laut dengan melakukan pengembangan dari hulu yaitu pengembangan bibit hasil kultur jaringan dan hilir yaitu

penanganan pasca panen di 19 kabupaten/kota serta percontohan budidaya laut (*marine culture*) yang ramah lingkungan di kabupaten/kota yang sesuai dengan potensi dan daya dukungnya.

- c. Pengembangan sarana dan prasarana perbenihan untuk produksi benur yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan benur pada program prioritas dan permintaan masyarakat dalam mengembangkan usaha budidaya payau.
- d. Revitalisasi sarana dan prasarana perikanan budidaya payau dan air tawar dalam rangka peningkatan produksi dan pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana alam dan pandemik global.
- e. Pengendalian dan pengelolaan Kesehatan lingkungan budidaya payau, tawar dan laut.
- f. Koordinasi lintas sektor dalam mendukung program prioritas daerah.

Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lain perlu diperhatikan berbagai upaya salah satunya yaitu penguatan kelembagaan, akses permodalan, perluasan jejaring, kerjasama antar pemerintah, institusi, lembaga, swasta dan kemitraan serta mengoptimalkan hilirisasi produk yang dapat memberikan dampak perekonomian daerah.

### **3. Program Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

#### **Indikator Program :**

- a. **Produksi garam rakyat tahun 2021 sebesar 46.500 ton dan pada triwulan II telah mencapai 466.05 ton atau 1,002%**
- b. **Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan tahun 2021 sebesar 50,17 %% pada triwulan II telah mencapai 36.96%**
- c. **Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan tahun 2021 sebesar 67,29% (674.229,5 Ha) pada triwulan II telah mencapai 30%**

Pada tahun 2021 Program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 10.857.763.852,- dan pada triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 2.044.337.320,- dengan capaian realisasi keuangan 18,83% dan fisik 34.03%. Program ini diarahkan pada pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dimana diupayakan pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya **pesisir dan pulau-pulau kecil** yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program ini diarahkan pada pengembangan pengembangan dan pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu program yang mendukung penanganan kemiskinan dan kesejahteraan nelayan. Perubahan sosial ekonomi di desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil atau desa nelayan telah memperjelas garis stratifikasi sosial masyarakatnya. Nelayan kecil merupakan lapisan yang paling banyak jumlahnya dimana mereka hidup dalam taraf kemiskinan dan tekanan-tekanan sosial ekonomi yang berakar pada faktor-faktor kompleks yang saling terkait. Salah satu strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yaitu meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan. Program pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada upaya pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya agar dapat menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Usaha tersebut sebagai perwujudan bagi Sulawesi Selatan sebagai Entitas Sosial Ekonomi yang berkeadilan. Tujuan yang dapat dicapai adalah untuk meningkatkan daya tarik wilayah terhadap investor termasuk kunjungan wisata dan sekaligus juga dapat memberi iklim yang kondusif bagi Sulawesi Selatan dalam pengembangan kegiatan konservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta mendukung penurunan/emisi karbon.

Adapun dukungan kegiatannya adalah sebagai berikut.

## 1. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- c. Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- d. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka kesejahteraan masyarakat pesisir dan pemulihan ekonomi dilakuka pengembangan usaha garam di 5 kabupaten yaitu Pangkep, Takalar, Jeneponto, Selayar dan Maros dimana input produksi memberikan dampak hasil yang cukup menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi pengembangan berada pada optimalisasi pengembangan dengan menyediakan fasilitas prasarana seperti gudang garam mini, penerapan teknologi produksi dan penanganan pasca panen. Dalam rangka mendukung industrialisasi garam dilakukan kerjasama lintas sektor dimana peran yang akan dilakukan yaitu dapat menjamin ketersediaan stok/bahan baku garam untuk industrialisasi dan melakukan inovasi produk garam menjadi produk yang lebih berdaya saing.

## 1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
- c. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- d. Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Adapun upaya yang dilakukan pada subkegiatan adalah

- a. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.
- b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
- c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan
- d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan inovasi pemanfaatan dan pengelolaan.
- e. Penyusunan kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang
- f. Pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan
- g. Mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses
- h. Ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.
- i. Pengembangan Wisata Bahari dan pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem pesisir dengan integrasi pengembangan lintas sektor serta edukasi kepada masyarakat.
- j. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok masyarakat untuk mendukung kelestarian kawasan konservasi dan melakukan pembinaan kelompok.

#### **4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Indikator Program**

:

- a. Nilai Hilirisasi Produk olahan ikan konsumsi dan non konsumsi tahun 2021 sebesar Rp. 304.96 Milyar pada triwulan II telah mencapai Rp. 19.13 Milyar atau 6,27%**
- b. Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi tahun 2021 sebesar 5.329,0 ton menjadi 5.544,1 ton pada triwulan II telah mencapai 2373.50 ton atau 42,18%**
- c. Persentase pembinaan mutu produk perikanan tahun 2021 sebesar 60% pada triwulan II telah mencapai 50.84%**

Pada tahun 2021 Program ini melaksanakan anggaran sebesar Rp. 2.390.927.923,- dan pada triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 213.299.700,- dengan capaian realisasi keuangan 8,92% dan fisik 60,54%. Program ini diarahkan untuk mendukung hilirisasi produk perikanan dan melanjutkan kegiatan tahun sebelumnya. Dalam rangka peningkatan konsumsi ikan pada masyarakat untuk menghadapi masa pandemik dan menumbuhkan kembali usaha unit pengolah yang tahun 2020 mengalami masa sulit dalam berusaha akibat pandemik global maka optimalisasi pengembangan yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan fasilitasi bimbingan, pembinaan dan revitalisasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran dalam mendukung bahan baku industri serta melakukan inovasi olahan produk perikanan. Adapun dukungan kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
- b. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing

Pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran diarahkan pada program hilirisasi perikanan dengan melakukan inovasi produk pengolahan agar produk perikanan memiliki nilai tambah produk sehingga memberikan dampak hasil yang cukup menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu program ini mendukung pencapaian indikator SDGs untuk penurunan stunting dan pemulihan ekonomi. Selain itu dalam rangka mendukung industrialisasi, akan dilakukan pemetaan dan pemantauan bahan baku usaha pengolahan, pengujian sampel mutu produk, dan pengembangan informasi manajemen logistik ikan secara digitalisasi.

### **Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

#### **Indikator Program :**

**Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tahun 2021 sebesar 87,48% pada triwulan II telah mencapai 71,57%**

Pada tahun 2021 Program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 11.139.152.608,- dan pada triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 420.389.928,- dengan capaian realisasi keuangan 3.77% dan fisik 71.57%. Pada program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk memelihara dan melindungi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terutama Sumberdaya yang telah mengalami degradasi tingkat produktivitasnya. Upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung program yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dalam memelihara dan melindungi sumberdaya perikanan dan kelautan dengan membentuk system pengawasan berbasis masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan khususnya untuk pengawasan destructive fishing, illegal fishing, pengamanan sumberdaya ikan dan lingkungan, penataan dan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perikanan. Program ini juga diarahkan untuk penguatan kelembagaan organisasi masyarakat lokal sebagai upaya strategis dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dengan meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pengawasan

sumberdaya kelautan dan perikanan. Program ini memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
- b. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil

Usaha yang dapat dilakukan dalam mendukung kegiatan yaitu :

1. Patroli dalam rangka pengawasan baik di laut, perairan umum dan darat serta koordinasi dan pengawasan terpadu bersama aparat terkait dalam rangka melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran dan penanganan kasus.
2. Kerjasama antar pemerintah pusat, kabupaten/kota maupun provinsi lain dalam rangka pengawasan wilayah laut dan perairan umum.
3. Sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan terhadap larangan penggunaan bahan dan alat tangkap yang dapat merusak sumberdaya perikanan.
4. Intensifikasi pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan bahan terlarang untuk penanganan hasil perikanan
5. Pelatihan kesadaran masyarakat dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan sumberdaya perikanan
6. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok masyarakat Pengawas Perikanan disetiap daerah dan melakukan pembinaan
7. Himbauan dan larangan terhadap pengambilan terumbu karang dan biota - biota tertentu yang dianggap telah hampir punah.
8. Melalui usaha tersebut diatas, maka diharapkan tingkat kerusakan sumberdaya perikanan dan kelautan berkurang dan terjadi peningkatan produktivitas tangkapan ikan.

Untuk kelancaran dan dukungan operasional kegiatan maka terdapat Program Penunjang untuk mendukung Program Utama yaitu :

## **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Indikator Program :

- a. Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah dengan target indikator kinerja tahun 2021 yaitu 100% dan pada triwulan II mencapai 30.91%
- b. Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan Sangat Baik dengan target indikator kinerja tahun 2021 yaitu 100% dan pada triwulan II mencapai 30 %
- c. Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP dengan target indikator kinerja tahun 2021 yaitu 100% dan pada triwulan II mencapai 85%

Pada program ini melaksanakan anggaran sebesar Rp. 31.559.241.595,- dan pada triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 15.027.946.070,- dengan capaian realisasi keuangan 47,62% dan fisik 50,85% dengan kegiatan sebagai berikut :

### ***1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***

Adapun sub kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

### ***2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***

Adapun sub kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

### **3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Adapun sub kegiatan :

- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

### **4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Adapun sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

### **5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Adapun sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

### **6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Adapun sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Mebel
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**TABEL 2.2**  
**EVALUASI TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA JANGKA PENDEK**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULSEL TAHUN 2020 DAN TAHUN BERJALAN 2021**

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -		REALISASI KINERJA		CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			2020	2021	2020	2021 Tw 1	2020	2021 Tw 1	
1	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi OPD	75,00	75,15	Proses	-	-	-	Data belum ada
1.1	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.85	80.87	85,61	-	104,63	-	Akhir tahun 2020 baru ada realisasi kinerja
		Persentase capaian kinerja Program Perangkat Daerah (%)	95	96	135,25	-	142,36	-	
		Persentase Nilai Temuan Material LHP yang ditindaklanjuti (%)	82	83	99,48	-	121,31	-	
1.1.1	Program Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah (%)	100	100	100	50	100	50	
		Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan Sangat baik (%)	100	100	100	50	100	50	
		Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP (%)	100	100	100	--	100	--	
2.	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk komoditas unggulan kelautan dan perikanan	Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan (%)	9,2	10,01	8,7	-	87,00	-	Data belum ada tahun 2020
2.1	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	4.2	4.6	8,5	-	202,4	-	

	produksi								
		Produksi Perikanan (ton)	4.092.881,4	4.342.259,8	4.147.630,5	-	101,34	-	Data belum masuk tahun 2021
2.1.1	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap (Rp.M)	8.675,44	8.852,48	8.678,9	-	100,04	-	
		Produksi perikanan tangkap (ton)	389.052,4	396.992,3	389.208,2	-	100,04	-	
		Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional (%)	-	57,89	-	-	-	-	
2.1.2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai Hilirisasi produksi perikanan budidaya (Rp.M)	14.250,56	14.474,73	13.785,5	-	98,74	-	
		Produksi perikanan budidaya (ton)	3.703.829,0	3.898.767,4	3.713.111,8	-	100,25	-	
		Persentase ketersediaan benur berkualitas (%)	-	100	-	-	-	-	
2.2	Sasaran : Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	Konsumsi Ikan kg/kap/th	55	59,5	65,5	-	110,08	-	Akhir tahun 2020 baru ada realisasi kinerja
2.2.1	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai hilirisasi produk olahan ikan konsumsi dan non konsumsi (Rp. M)	-	304,96	-	-	-	-	
		Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi (ton)	5.192,06	5.329	5.235,6	-	98,25	-	
		Persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan (%)	-	60	-	-	-	-	

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -		REALISASI KINERJA		CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			2020	2021	2020	2021 Tw 1	2020	2021 Tw 1	
2.3	Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101.35	102.37	99,64	-	98,31	-	Data belum masuk
	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	20.06	23,89	20.06	6,69	33,34	-	
		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	24.26	25.61	10,2	-	42,04	-	
2.3.1	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	Potensi penurunan emisi GRK (juta ton CO2) dari sektor perikanan	0.68	0.69	0.68	-	100	-	
	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (%)	-	23,89	20.06	-	-	-	
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	35,37	35,72	52,33	-	157,11	-	
		Prosentase Penurunan tindakan IUU Fishing (%)	-	35.72	35.37	-	-	-	
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan PPK	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)	-	67,29	-	-	-	-	
	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)	-	87,48	-	-	-	-	

Tabel 2.3

**Realisasi Kemajuan Belanja Apbd Provinsi Sulawesi Selatan  
S/D Bulan: Juni Tahun 2021**

KODE ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	BOBO T (%)	REALISASI BULAN S/D BULAN JUNI			SISA DANA / BELUM DICAIRKAN SAMPAI DENGAN BULAN JUNI			
		TOLAK UKUR	TARGET			KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA RENJA		% FISIK		
						(Rp)	(%)					
3.25.0.00.0.00.38.000 0				102,106,107,52 6.0	0.85	21,008,036,24 3.0	20.5 7		33.12	81,098,071,283.0		
3.25.0.00.0.00.38.000 0	0 1		Dinas Kelautan dan Perikanan									
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %	31,559,241,595 .0	30.91	15,027,946,07 0.0	47.6 2	90.07	50.58	16,531,295,525.0
				Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100 %					100.00		
				Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100 %					96.67		
3.25.0.00.0.00.38.000 0	0 1	1 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			809,531,668.0	2.57	225,561,900.0	27.8 6		39.09	583,969,768.0
3.25.0.00.0.00.38.000 0	0 1	1 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			25,604,108,204 .0	81.13	13,361,819,264. 0	52.1 9		51.85	12,242,288,940.0
3.25.0.00.0.00.38.000 0	0 1	1 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			125,137,912.0	0.40	36,670,000.0	29.3 0		43.44	88,467,912.0
3.25.0.00.0.00.38.000 0	0 1	1 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,632,912,100. 0	5.17	437,170,117.0	26.7 7		44.01	1,195,741,983.0
3.25.0.00.0.00.38.000 0	0 1	1 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,582,760,221. 0	8.18	816,820,361.0	31.6 3		50.00	1,765,939,860.0

3.25.0.00.0.00.38.000	0	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			804,791,490.0	2.55	149,904,428.0	18.63		38.18	654,887,062.0
3.25.0.00.0.00.38.000	0	2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	Produksi garam rakyat Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	46500 Ton 50.17 % 67.29 %	10,857,763,852.0	10.63	2,044,337,320.0	18.83	1155.00 28.28 67.29	33.68	8,813,426,532.0
3.25.0.00.0.00.38.000	0	2	1.0 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			9,713,678,584.0	89.46	2,014,148,320.0	20.74		35.72	7,699,530,264.0
3.25.0.00.0.00.38.000	0	2	1.0 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			1,144,085,268.0	10.54	30,189,000.0	2.64		16.35	1,113,896,268.0
3.25.0.00.0.00.38.000	0	3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional Nilai Produksi Perikanan Tangkap Produksi perikanan tangkap Cakupan Bina Kelompok Nelayan	57.89 % 8852.48 Rp. M 396992.3 Ton 23.89 %	26,519,004,784.0	25.97	1,684,203,125.0	6.35	63.16 12668.91 416076.40 18.47	14.77	24,834,801,659.0

				Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	25.61 %				18.11		
3.25.0.00.0.00.38.00 00	0 3	1. 01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			13,909,240,51 2.0	52.4 5	292,578,400. 0	2.1 0	5.00	13,616,662,112.0
3.25.0.00.0.00.38.00 00	03	1. 02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			3,661,241,500. 0	13.8 1	374,500,000. 0	10. 23	18.00	3,286,741,500.0
3.25.0.00.0.00.38.00 00	0 3	1. 06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			8,948,522,772. 0	33.7 4	1,017,124,72 5.0	11. 37	28.63	7,931,398,047.0
<b>3.25.0.00.0.00.38.00 00</b>	<b>0 4</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Nilai produksi perikanan budidaya Produksi perikanan budidaya Persentase ketersediaan benur berkualitas</b>	<b>14474.73 Rp. M 3898767.4 Ton 100 %</b>	<b>19,640,016,76 4.0</b>	<b>19.2 3</b>	<b>1,617,860,10 0.0</b>	<b>8.2 4</b>	<b>15445.37 3850102. 40 96.99</b>	<b>24.54 18,022,156,664.0</b>
3.25.0.00.0.00.38.00 00	0 4	1.0 5	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			19,640,016,76 4.0	100. 00	1,617,860,10 0.0	8.2 4	24.54	18,022,156,664.0
<b>3.25.0.00.0.00.38.00 00</b>	<b>0 5</b>		<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA</b>	<b>Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap</b>	<b>87.48 %</b>	<b>11,139,152,60 8.0</b>	<b>10.9 1</b>	<b>420,389,928. 0</b>	<b>3.7 7</b>	<b>63.87 36.10</b>	<b>10,718,762,680.0</b>

			<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	ketentuan peraturan perundangan yang berlaku								
3.25.0.00.0.00.38.00 00	0 5	1.0 1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			11,139,152,60 8.0	100. 00	420,389,928. 0	3.7 7		36.10	10,718,762,680.0
<b>3.25.0.00.0.00.38.00 00</b>	<b>0 6</b>		<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi Persentase Pembinaan mutu produk perikanan Nilai Hilirisasi Produksi olahan lkan konsumsi dan non konsumsi</b>	<b>5329 Ton  60 %  304.96 Milyar</b>	<b>2,390,927,923. 0</b>	<b>2.34</b>	<b>213,299,700. 0</b>	<b>8.9 2</b>	<b>5497.40  280.33</b>	<b>60.27</b>	<b>2,177,628,223.0</b>
3.25.0.00.0.00.38.00 00	0 6	1.0 2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			2,390,927,923. 0	100. 00	213,299,700. 0	8.9 2		60.27	2,177,628,223.0

### c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel berikut ini menunjukkan pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 s/d 2021 sebagaimana tabel berikut ini (terlampir). Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 dan Implikasi capaian IKU terhadap Renstra 2018 -2023 maka Evaluasi Capaian Renstra yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran sebagai berikut :

#### a. Sasaran :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

**Tabel 2.5**  
**IKU terkait sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE		REALISASI KINERJA		CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			2020	2021	2020	2021 Tw 1	2020	2021	
1.1	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Ni lai Sakip OPD (%)	80.85	80.87	84.59	-	104,63	-	
		Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah(Evaluasi Dokumen Perencanaan) (%)	95	95	135, 25	-	142.36	-	
		% ASN Nilai SKP Kategori Baik	82	83	99.48	-	121.31	-	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						122,77		Predikat sangat baik	

Untuk mencapai sasaran diatas maka terdapat 2 strategi yaitu 1) penguatan kapasitas aparatur dalam perencanaan dan pengelolaan 2) ketersediaan dukungan operasional kegiatan . Program kegiatan yang dominan terhadap pencapaian sasaran tersebut yaitu program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja, Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Indikator kinerja utama yang terkait dengan peningkatan kontribusi sektor perikanan adalah seperti pada tabel 2.6.

Berdasarkan data diatas persentase capaian terhadap Rencana Kerja tahun 2020 yaitu

Nilai Sakip OPD diharapkan dapat mencapai target, kemudian rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan) telah mencapai 122,77% dan telah mencapai target perencanaan hal ini dipengaruhi oleh beberapa program kegiatan telah melampaui target indikator kinerja. Kemudian % ASN rata-rata memiliki nilai SKP Kategori Baik dimana Integritas dan Komitmen ASN untuk bekerja dan melakukan pelayanan sudah ada peningkatan.

**b. Sasaran :**

**Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi**

Sasaran ini didukung oleh Program **Program Hilirisasi Perikanan** yang merupakan program prioritas dan Program Peningkatan Produk Kelautan dan Perikanan yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan dimana indikator kinerjanya fokus pada nilai hilirisasi produk. Program ini dikembangkan agar terjadi peningkatan produktivitas produksi dan optimalisasi hilirisasi produk untuk mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu Pengembangan Hilirisasi Komoditas Unggulan dengan melakukan Diseminasi teknologi dan Inovasi baik pada pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengembangan usaha garam dan pengembangan usaha pengolahan sampai tahun 2023.

**Tabel 2.6**  
**IKU terkait sasaran Meningkatkan produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -		REALISASI KINERJA		CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			2020	2021	2020	2021 Tw1	2020	2021	
2.1	Sasaran : Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi	Produksi Perikanan (ton)	5.117.387,52	5.558.740,80	4.061.326	909.471,5	83,49	16,36	
		Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	80.010.21	80.810.31	174.620,24	-	219,01	-	2020 Data belum masuk
		Kontribusi PDRB Perikanan (%)	8,6	8,8	8,5	-	98,83	-	2020 Data belum masuk
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	30,18	33,20	17,52	-	58,05		2020 Data belum masuk
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						113,62		Predikat sangat baik

Adapun tujuan sasaran adalah (1) Peningkatan Pendapatan, (2) Penyerapan Tenaga Kerja melalui usaha perikanan budidaya. Selain itu komoditas udang, bandeng

dan rumput laut tetap menjadi komoditas unggulan sehingga perlu digalakkan dalam rangka peningkatan produksi budidaya. Peluang pengembangan budidaya dan perikanan tangkap berupa inovasi teknologi yang dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan memfasilitasi pelayanan kepada pembudidaya dan nelayan baik skala besar maupun skala kecil dengan memperhatikan aspek kualitas mutu dan higienisasi sarana prasarana perikanan. Pengembangan usaha garam juga menjadi prioritas pada program hilirisasi perikanan dimana input produksi memberikan dampak hasil yang cukup menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi pengembangan berada pada 5 kabupaten yaitu kabupaten Jeneponto, kabupaten Takalar, kabupaten Pangkep, Maros dan kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun optimalisasi pengembangan dengan menyediakan fasilitas prasarana seperti gudang garam kapasitas <100 ton, penerapan geomembran, integrasi lahan minimum 15 Ha per lokasi PUGAR dan pemberdayaan masyarakat pengembang usaha garam.

**c. Sasaran :**

**Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan**

Tahun 2020 konsumsi ikan meningkat mencapai 57,40 kg/kap dari target tahun 2020 sebesar 56,3 kg/kap dan di tahun 2021 konsumsi ikan di Sulawesi Selatan diharapkan dapat meningkat lagi. Sedangkan pencapaian konsumsi ikan nasional pada tahun 2020 telah mencapai 56,39 kg/kap (Data KKP) menargetkan pencapaian konsumsi ikan untuk tahun 2020 sebesar 54,49 kg/kap . Hal ini menggambarkan bahwa produk perikanan untuk dikonsumsi tersedia dan cukup baik yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya. Selain itu, peningkatan capaian rata-rata konsumsi ikan perkapita Sulawesi Selatan tersebut juga menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan kampanye Gemar Makan Ikan memberikan hasil yang signifikan.

**Tabel 2.7**  
**IKU terkait sasaran Meningkatkan konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -		REALISASI KINERJA		CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	
2.2	Sasaran : Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	Konsumsi Ikan kg/kap/th	53,60	54,10	57,40	-	107,09	-	Akhir tahun 2020 baru ada realisasi kinerja
		Kontribusi Ekspor Perikanan (%)	5.63	5.92	8,08	-	143,55	-	2020 Data belum masuk
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						125,32		Predikat sangat baik

**d. Sasaran :**

## Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan

Pada tahun 2021 telah diupayakan perbaikan sarana dan prasarana di daerah-daerah pesisir dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat pesisir, sehingga kemajuan akses masyarakat yang berada di pulau-pulau dan wilayah pesisir terhadap pembangunan dapat berkembang lebih baik. Perbaikan-perbaikan tersebut meliputi sarana tambatan perahu. Pada tahun 2021 ditargetkan cakupan Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah mencapai 20% sampai akhir anggaran tahun 2020. Begitu strategis dan tingginya potensi bahari yang dimiliki Sulawesi Selatan, menjadi hal penting bagaimana daerah ini dapat memberdayakan desa pesisir yang tersebar di beberapa kabupaten/kota sehingga berdampak pada pencapaian Nilai Tukar Nelayan. Berdasarkan hasil perhitungan BPS, NTN pada tahun 2020 telah mencapai 99,64 (dampak Covid-19) diharapkan tahun 2021 dapat mencapai peningkatan.

**Tabel 2.8**  
**IKU terkait Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -		REALISASI KINERJA		CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			2020	2021	2020	2021 tw2	2020	2021 tw2	
2.3	Sasaran : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	NilaiTukar Nelayan (NTN)	101.35	102.37	99.64	104,75	98.31	102.32	2020 Data belum masuk
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						99,82		Predikat sangat baik

### e. Sasaran : Meningkatkan kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan

Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan, telah dilaksanakan identifikasi potensi sumber daya wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, identifikasi kawasan konservasi laut, pembudidayaan *mangrove fisheries*, penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta penegakan hukum dalam tindak pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Indikator ini didukung dengan Program Pengawasan, konservasi, penataan dan rehabilitasi pesisir dan laut dimana dilakukan pengawasan untuk penerapan IUU Fishing sehingga diharapkan proporsi tangkapan ikan dapat mencapai batas yang diijinkan agar

sumberdaya ikan tidak berkurang. Demikian juga pada kawasan lindung dan perairan juga dilakukan penataan dan rehabilitasi sehingga rasio kawasan lindung dapat terjaga

**Tabel 2.9**  
**IKU terkait Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -		REALISASI KINERJA		CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			2020	2021	2020	2021 Tw1	2020	2021 Tw1	
3.1	Sasaran : Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	0,26	0,28	1,01	-	388,46	-	2021 Data belum masuk
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	49,10	50,60	48,92	-	119,53	-	2021 Data belum masuk
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran							254,0		Predikat sangat baik

Realisasi presentase rata-rata capaian Indikator Kinerja /IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 adalah 143,11 (**predikat sangat baik**). Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

## 2.2 . Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Sehingga ditetapkan pelayanan dan penetapan Kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 mempunyai komitmen kinerja yaitu :

### a. Kinerja Pelayanan

1. Memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan produksi perikanan dan pembinaan kelompok nelayan yaitu berupa :

- a. Memberikan pelayanan Surat Rekomendasi Izin Usaha Pembudidayaan Ikan yang Baik (CBIB) dengan hasil capaian pelayanan sebanyak , pada triwulan II sudah melakukan pelayanan sebanyak 119 surat rekomendasi
  - b. Memberikan pelayanan Surat Rekomendasi Izin Usaha Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) dengan hasil capaian pelayanan triwulan II sudah melakukan pelayanan sebanyak sebanyak 27 surat rekomendasi
  - c. Memberikan pelayanan Rekomendasi Impor Produk Perikanan dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 1 unit pengolahan ikan.
  - d. Memberikan pelayanan Rekomendasi Impor induk udang vanname dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 4 unit dengan jumlah impor induk udang sebanyak 16.000 pasang induk dan ikan koi/mas/koki 15.000 ekor.
  - e. Memberikan pelayanan Rekomendasi dalam rangka penerbitan izin usaha Perikanan tangkap dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 1.004 unit usaha.
  - f. Produksi Benih Ikan Air Tawar sebanyak 5.304.000 Ekor berukuran 1-3 cm dengan perincian ikan mas : 3.902.500 ekor dan ikan nila : 1.401.500 ekor.
  - g. Produksi Benur sebanyak 2.936.200 Ekor dengan jenis vannamei sebanyak 1.215.000 ekor dan jenis windu sebanyak 1.585.200 ekor.
  - h. Memberikan pelayanan rekomendasi ijin usaha perikanan tangkap dan surat keterangan andon.
2. Memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan konsumsi ikan
    - a. Melakukan pengujian mutu hasil perikanan dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 4.797 unit .
    - b. Memberikan rekomendasi ijin usaha perikanan dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 2.151 unit
  3. Memberikan pelayanan rekomendasi pemanfaatan kawasan konservasi dan perairan dan pembinaan peningkatan kualitas lingkungan pesisir dan ekosistem laut.
- Adapun evaluasi pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel 2.11

### **Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk sektor kelautan dan perikanan merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan indikator kinerja kunci Urusan Kelautan dan Perikanan selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.7**  
**(Tabel T-C 30, sesuai Permendagri 86 Tahun 2017)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8		-9	-10	-11	-12	-13
PENYELENGGARAAN PELAYANAN													
I BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
1	Produksi Perikanan		107.34 %	5.117.387,5 ton	5.558.740,8 ton	6.041.173,54 ton	6.568.596,04 ton	7.145.295,69 ton	4.061.329 ton	909.471,5 ton (Data Triwulan II)	2.801.433,4 ton	3.576.648,4 ton	Adanya Pandemi Covid terjadi perlabatan pertumbuhan produksi
2	Konsumsi Ikan		120.80 %	53,60 kg/kap/th	54,10 kg/kap/th	54,60 kg/kap/th	55,20 kg/kap/th	55,70 kg/kap/th	57,40 kg/kap/th	--	55.00 kg/kap/th	59.5 kg/kap/th	
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)		36.51 %	30,18 %	33,20%	36,51 %	40,17%	44,18%	17,52%	--	17.72%	17.95%	
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)		23.32 %	80.010.21 ton	80.810.31 ton	81.618,40 Ton	82.434.60 ton	83.258.94 ton	174.620,24 ton	--	174.279 ton	175.150 ton	
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)		52.10 %	49.10 %	50.60%	52.10 %	53.6%	55.10%	58,69%	--	29.47%	33.89%	
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)		0.3 %	0,26 %	0,28%	0,30%	0,32%	0,34 %	1,01%	--	1.02%	1.03%	
7	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (%)		108 %	107.79	107.89	108	108.11	108.22	107,8	--	100.58	100.59	

TABEL 2.8

## EVALUASI PENCAPAIAN SDGs SEKTOR KELAUTAN

Kode Indikator	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Target TPB/SDGs					Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
				2017	2018	2020	2020	2021	2017	2018	2020	2020	2021 Tw 2	
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	87%	87%				83,86	84,08	54,8	77,9	66,4	82,4		Dinas kelautan dan perikanan
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil		2 regulasi	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	Dinas kelautan dan perikanan
14.b.1.(a)	Jumlah Kab/ Kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan		19 kab/kota				19	19	19	19	19	19	8	Dinas kelautan dan perikanan
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi (Orang)	500.000	197.253				39.451	78.902	23.814	37.811	11.587	11.827	-	Dinas Kelautan dan Perikanan

Pencapaian target indikator SDGs yaitu :

1. Persentase kepatuhan pelaku usaha pada tahun 2020 sebesar 82,4 % namun 2021 belum ada realisasi triwulan II;
2. Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil pada tahun 2020 terdapat 1 regulasi yaitu Perda No. 2 Tahun 2020 tentang RZWP3K dimana diatur tentang hak akses untuk usaha Perikanan skala kecil dan pada tahun 2020 ditetapkan Perda No. 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan Sumberdaya Ikan tanggal 9 Juni 2020;
3. Jumlah Kab/ Kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan pada tahun 2020 dan 2020 sebanyak 19 kabupaten/kota memiliki hak akses dalam permodalan dan pendanaan untuk pengembangan usaha seperti KUR dan Jaminan dalam berusaha melalui pelayanan kartu KUSUKA;
4. Jumlah nelayan yang terlindungi (Orang) yaitu nelayan mendapatkan

jaminan asuransi dalam melakukan usahanya dimana pada tahun 2020 sebanyak 11.827 orang dan pada tahun 2020 data belum dapat dihimpun pada triwulan II.

### **2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 dan Evaluasi Renja Triwulan II merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan dalam membangun sinergitas dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2022.

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kelautan dan perikanan antara lain :

1. Adanya pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM) sehingga aktivitas pembudidaya dan nelayan terhambat pada kebutuhan sarana operasional ;
2. Pelayanan tidak dapat maksimal karena dampak pandemik;
3. Pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang diharapkan karena pemberlakuan pembatasan kegiatan di masa pandemik;
4. Terdapat beberapa target indikator yang berpotensi tidak tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan kelautan dan perikanan kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, diantaranya adalah :

1. Bergesernya proses pengadaan barang dan jasa, tender/lelang sehingga pelaksanaan kegiatan tidak selesai tepat waktu;

2. Kebutuhan Bahan Bakar untuk operasional kegiatan baik darat maupun di laut terbatas karena anggaran tidak tersedia akibat refocusing anggaran;
3. Pendampingan dan pembinaan pada masyarakat terbatas karena tidak tersedianya anggaran;
4. Unit kerja masih belum memahami pencapaian indikator kinerja sehingga masih terdapat target indikator yang belum tercapai;
5. Unit kerja belum memahami target indikator yang berdampak hasil (outcomes) sehingga penerapan kebijakan pemerintah yaitu Quick Wins (perubahan yang terjadi pada masyarakat) belum sepenuhnya tercapai.

Faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan, adalah: - Kurangnya kegiatan yang sifatnya padat karya, penguatan iklim investasi dalam menghadapi pasar baik local maupun global, berbagai perilaku birokrasi dan regulasi yang tidak kondusif.

## **2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 merupakan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam membangun sinergitas dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2022.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya guna mewujudkan pencapaian sasaran program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2022 maka berdasarkan RPJMD Perubahan 2018-2023 diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yaitu :

### **Misi ke-5 Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup**

- ❖ Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup.
- ❖ Target Indikator Tujuan : PDRB Hijau
- ❖ Sasaran : Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam.
- ❖ Target Indikator Sasaran Tahun 2022 : Kontribusi PDRB

Sehingga berdasarkan Misi, tujuan dan capaian sasaran tersebut disusun program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan secara bersama-sama yang saling terkait dan saling memperkuat satu dengan lainnya. Keberhasilan pelaksanaan Misi satu juga turut menentukan keberhasilan Misi lainnya oleh sebab itu, maka setiap tahun kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan ke dalam Dokumen RKPD sebagai dokumen yang sifatnya lebih operasional.

Pada tahun 2022 seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global. Pada tahun ini juga dilakukan review RPJMD Perubahan guna melakukan penyesuaian-penyempurnaan dalam merespons perubahan lingkungan strategis yang dianggap signifikan pengaruhnya. Prioritas kebijakan pembangunan pada tahun 2022 diarahkan pada:

- a. Untuk **tahun 2022 fokus pada Pertumbuhan** dan **pemerataan** pembangunan menjadi satu kesatuan yang diarahkan pada pencapaian tingkat kemakmuran masyarakat. Kualitas pertumbuhan merupakan pertumbuhan yang mengedepankan unsur pemerataan yang berkeadilan, sedangkan pemerataan pembangunan pada semua sektor pembangunan di kabupaten/Kota berdasarkan potensi dan peluang yang dimiliki setiap daerah; **Kualitas pertumbuhan** diarahkan pada pertumbuhan sektor unggulan,

yang dipicu oleh meningkatnya nilai tambah pengelolaan SDA khususnya pada sektor perikanan dan industri pengolahan, diharapkan memicu pertumbuhan sektor unggulan lainnya. Untuk meningkatkan nilai tambah dalam proses produksi barang dan jasa dibutuhkan dukungan investasi; **Optimalisasi pengelolaan SDA yang berkelanjutan** menekankan pada kelestarian lingkungan hidup, berwawasan lingkungan, dan ramah lingkungan.

- b.** Tahun 2020 telah terjadi **Pandemik COVID-19** sehingga berdampak pada sosial ekonomi masyarakat pesisir oleh karena itu tahun 2022 perlu perencanaan dalam rangka penanganan dampak pasca Pandemi COVID-19.
- c.** Bentuk amanah yang tertuang dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2022 untuk sektor Perikanan terdapat **program Prioritas yaitu Hilirisasi Perikanan dengan komoditas unggulan yaitu Udang Windu dan Rumput Laut dan komoditas lainnya yang bernilai ekonomis**, dan mensinergikan keterkaitan dengan dokumen RPJMN nasional telah dituangkan dalam **agenda Nasional**.

Agar Rencana program kegiatan lebih terarah dan konsisten terhadap dokumen RPJMD dan Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, maka review rancangan awal disajikan dalam bentuk tabel 2.6 atau Tabel C-31 sesuai lampiran permendagri 86 Tahun 2017 dengan dengan memperhatikan :

1. Indikator pada program kegiatan agar lebih tajam dan tepat sasaran terutama pada program teknis.
2. Penetapan pagu per kegiatan harus memperhatikan target indikator jika pagu berkurang maka dilakukan penyesuaian target indikator, perubahan lokasi dan kelompok sasaran.
3. Adanya penambahan target capaian, lokasi dan penyesuaian dengan kebutuhan tahun berjalan

**Tabel 2.13**  
**(Tabel T-C 31, sesuai Permendagri 86 Tahun 2017)**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan**

**Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.38.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					102.739.562.704.000				
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					36.421.961.970.4				
3	25	00	1	1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>850.008.251.4</b>				
3	25	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	15 Dokumen	117.983.775	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	15 Dokumen	112,000,000
3	25	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	48 Dokumen	59.417.925	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	48 Dokumen	40,000,000
3	25	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	30 Dokumen	15.537.735	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	30 Dokumen	20,000,000
3	25	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	30 Dokumen	26.628.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	30 Dokumen	15,000,000
3	25	1	1	5	Koordinasi dan	Dinas	Jumlah dokumen	30	24.944.850	Koordinasi dan	Dinas	Jumlah dokumen	30	20,000,000

					Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	Dokumen		Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	Dokumen	
3	25	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah data dan Informasi	2 Laporan	565.828.501.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah data dan Informasi	2 Laporan	500,000,000
				Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah Data Yang Dipublikasikan	6 Jenis	6 Jenis			Dinas 2.2Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Data Yang Dipublikasikan	6 Jenis	
				Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	10 Dokumen	10 Dokumen			Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	10 Dokumen	
3	25	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	38,667,825	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	15,000,000
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>00</b> <b>1</b>	<b>1</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>28.040.084.606.4</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>23.247.847.212</b>		
3	25	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan Gaji dan Tunjangan ASN yang terkoordinasi dan tepat waktu	12 Laporan	27.825.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan Gaji dan Tunjangan ASN yang terkoordinasi dan tepat waktu	12 Laporan	23,142,269,812
3	25	1	1	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	Jumlah laporan Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terverifikasi	4 Laporan	10.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	Jumlah laporan Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terverifikasi	4 Laporan	4,977,000

						Sulawesi Selatan					Sulawesi Selatan			
3	25	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan	12 Laporan	59.835.056.4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan	12 Laporan	20,000,000
3	25	1	1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan akuntansi SKPD yang dilaksanakan dan telah terkoordinasi	12 Laporan	48.323.100	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan akuntansi SKPD yang dilaksanakan dan telah terkoordinasi	12 Laporan	10,000,000
3	25	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dilaksanakan dan telah terkoordinasi	1 Laporan	3.039.750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dilaksanakan dan telah terkoordinasi	1 Laporan	3,000,000
3	25	1	1	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan dan dikelola	1 Laporan	40.563.600	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan dan dikelola	1 Laporan	30,000,000
3	25	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun dan telah terkoordinasi	18 Jenis Laporan	48.323.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun dan telah terkoordinasi	18 Jenis Laporan	35,000,000
3	25	1	1	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan analisis prognosis anggaran yang telah disusun	1 Laporan	5,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan analisis prognosis anggaran yang telah disusun	1 Laporan	3,000,000
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>001</b>	<b>1</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>35.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>1,003,489,000</b>
3	25	1	1	1	Penyusunan Perencanaan	Dinas Kelautan	Jumlah laporan penyusunan	1 Laporan	5,000,000	Penyusunan Perencanaan	Dinas Kelautan	Jumlah laporan penyusunan	1 Laporan	1,000,000

					Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	perencanaan kebutuhan Barang Milik SKPD			Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	perencanaan kebutuhan Barang Milik SKPD		
3	25	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan (Barru,	Jumlah pengamanan aset barang milik daerah	6 Unit	5.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah pengamanan aset barang milik daerah	6 Unit	997,000,000
3	25	1	1	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	5,000,000
3	25	1	1	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,000,000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,000,000
3	25	1	1	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1,000,000
3	25	1	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	umlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	umlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,000,000
3	25	1	1	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlha laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	5,000,000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlha laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1,000,000

3	25	00 1	1		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>				<b>20,000,000</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>				<b>10,000,000</b>
3	25	1	1	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan perencanaan pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	10,000,000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan perencanaan pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	5,000,000
3	25	1	1	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan perencanaan pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	10,000,000	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan perencanaan pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	5,000,000
3	25	00 1	1 1		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>537,384,807</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>82,035,200</b>
3	25	1	1	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai	2 UNIT	50.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai	2 unit	15,000,000
3	25	1	1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya	209 Pasang	182.490.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya	209 Pasang	144,000,000
3	25	1	1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan pendataan Administrasi kepegawaian yang diolah	12 Laporan	39.890.037	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan pendataan Administrasi kepegawaian yang diolah	12 Laporan	20,000,000
3	25	1	1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan data sistem informasi kepegawaian yang telah dikoordinasi	12 laporan	28.200.270	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan data sistem informasi kepegawaian yang telah dikoordinasi	12 laporan	15,000,000
3	25	1	1	5	Monitoring,	Dinas	Jumlah laporan	12	63.304.500	Monitoring,	Dinas	Jumlah laporan	12	30,000,000

			1		Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan		Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	
3	25	1	1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang telah diikuti	3 Laporan	157.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang telah diikuti	3 Laporan	150,000,000
3	25	1	1	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah peserta Sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 Orang	8.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah peserta Sosialisasi peraturan perundang-undangan	0 Orang	0
3	25	1	1	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	8.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>1.192.209.305</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>1,232,500,625</b>		
3	25	1	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	13,446,000	52.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	10 Jenis	20,000,000
3	25	1	1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	312,514,725	906.154.305	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	30 Unit	650,000,000
3	25	1	1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 Unit	10,500,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 Unit	10,500,000



		1	.	1	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
3	25	1	.	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, CDK dan UPT	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang telah diadakan	1 unit	750.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, CDK dan UPT	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang telah diadakan	0 unit	0
3	25	1	.	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah aset tak berwujud yang telah diadakan	1 Jenis	100,000,000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah aset tak berwujud yang telah diadakan	1 Jenis	100,000,000
3	25	00	.	1	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>2.965.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>3,584,921,114</b>
3	25	1	.	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah jasa Surat menyurat yang telah tersedia	12 Bulan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah jasa Surat menyurat yang telah tersedia	0 Bulan	0
3	25	1	.	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang telah tersedia	12 Bulan	1.260.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang telah tersedia	12 Bulan	971,779,082
3	25	1	.	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang telah tersedia	3 Jenis	15,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang telah tersedia	3 Jenis	5,000,000

3	25	1	1 1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	147 Orang	1.680.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	147 Orang	2,608,142,032
3	25	00 1	1 1		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.271.775.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1,035,000,000</b>
3	25	1	1 1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan bebas pajak	16 unit	26.775.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan bebas pajak	16 unit	350,000,000
3	25	1	1 1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang terpelihara dan bebas pajak	8 Unit	52.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang terpelihara dan bebas pajak	8 Unit	30,000,000
3	25	1	1 1	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah aset tak berwujud yang terpelihara	1 unit	52.500.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah aset tak berwujud yang terpelihara	1 unit	5,000,000
3	25	1	1 1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah gedung yang terpelihara/direhabilitasi	5 Unit	840.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah gedung yang terpelihara/direhabilitasi	5 Unit	400,000,000
3	25	1	1 1	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Dinas Kelautan dan	Jumlah sarana dan prasarana yang	20 unit	200,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Dinas Kelautan dan	Jumlah sarana dan prasarana yang	20 unit	200,000,000

					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	terpelihara/direhabilitas			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	terpelihara/direhabilitas		
3	25	1	1	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara/direhabilitasi	20 Unit	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara/direhabilitasi	20 Unit	50,000,000
3	25	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	<b>Produksi garam rakyat</b> <b>Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi</b> <b>Cakupan Luas Kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan</b>	<b>47.500 ton</b> <b>74.08%</b> <b>67.30%</b>	<b>14.121.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>Produksi garam rakyat</b> <b>Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi</b> <b>Cakupan Luas Kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan</b>	<b>47.500 ton</b> <b>74.08%</b> <b>67.30%</b>		<b>7,275,000,000</b>
3	25	002	1		<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan			<b>12.705.000.000</b>	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>				<b>6,500,000,000</b>
3	25	2	1	2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Peetapan Pencadangan Kawasan	3 Dokumen	525,000,000	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Jumlah Dokumen Peetapan Pencadangan Kawasan	3 Dokumen	500,000,000

						Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Rencana Aksi WP3K	1 Dokumen			Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Rencana Aksi WP3K	1 Dokumen		
						Jumlah Kelompok Konservasi yang dibentuk dan dibina	7 kelompok			Jumlah Kelompok Konservasi yang dibentuk dan dibina	7 kelompok		
						Jumlah Regulasi Konservasi dan Penataan Ruang Laut	3 Regulasi			Jumlah Regulasi Konservasi dan Penataan Ruang Laut	3 Regulasi		
						Jumlah sarana dan prasarana kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	2 Unit			Jumlah sarana dan prasarana kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	2 Unit		
3	25	2	1	3	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Pengelolaan dan Pembinaan Pantai Berseri	7 Lokasi	12,180,000,000	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pengelolaan dan Pembinaan Pantai Berseri	7 Lokasi	6,000,000,000
						Jumlah Prasarana Penanganan Sampah di pulau-pulau kecil	3 unit			Jumlah Prasarana Penanganan Sampah di pulau-pulau kecil	3 unit		
						Jumlah Rehabilitasi ekosistem Laut	2 unit rumah ikan			Jumlah Rehabilitasi ekosistem Laut	2 unit rumah ikan		
						Jumlah Rehabilitasi ekosistem Laut	5 unit artificial reef			Jumlah Rehabilitasi ekosistem Laut	5 unit artificial reef		
						Jumlah Rehabilitasi ekosistem pesisir	550000 batang			Jumlah Rehabilitasi ekosistem pesisir	550000 batang		
						Jumlah Tambatan Perahu yang terbangun	12 unit			Jumlah Tambatan Perahu yang terbangun	12 unit		
3	25	002	1		<b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi			<b>51.000.000</b>	<b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>		<b>25,000,000</b>	

					Selatan									
3	25	2	1	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Dokumen	10,000,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah dokumen Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Dokumen	5,000,000
3	25	2	1	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	4 Rekomendasi	12,000,000	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	4 Rekomendasi	5,000,000
3	25	2	1	3	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	4 Rekomendasi	12,000,000	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional		Jumlah Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	4 Rekomendasi	5,000,000
3	25	2	1	4	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	4 Rekomendasi	12,000,000	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir		Jumlah rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	4 Rekomendasi	5,000,000
3	25	2	1	5	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	5,000,000	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut		Jumlah dokumen Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	5,000,000
3	25	002	1		<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan</b>				<b>1.365,000,000</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan</b>				<b>750,000,000</b>

					<b>Pulau-Pulau Kecil</b>					<b>Pulau-Pulau Kecil</b>				
3	25	2	1	1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Sarana Inovasi Teknologi Usaha Masyarakat Pesisir	10 Unit	157,500,000	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Sarana Inovasi Teknologi Usaha Masyarakat Pesisir	10 Unit	150,000,000
3	25	2	1	2	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah sarana dan prasarana usaha garam	10 Unit	1.050,000,000	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah sarana dan prasarana usaha garam	10 Unit	500,000,000
3	25	2	1	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan usaha alternatif masyarakat pesisir berbasis inovasi	1 Kelompok	157,500,000	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan usaha alternatif masyarakat pesisir berbasis inovasi	1 Kelompok	100,000,000
							Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi garam	720 Orang				Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi garam	720 Orang	
3	25	3			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	<b>Persentase Pelabuhan Perikanan yang memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional</b>	<b>68.42</b>	<b>28.141.403.075</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>		<b>Persentase Pelabuhan Perikanan yang memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional</b>	<b>68.42</b>	<b>18.254.855.300</b>
							<b>Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap</b>	<b>9.029.52 M</b>				<b>Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap</b>	<b>9.029.52 M</b>	
							<b>Produksi Perikanan Tangkap</b>	<b>404.932.2 ton</b>				<b>Produksi Perikanan Tangkap</b>	<b>404.932.2 ton</b>	



3	25	00 3	1		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			850,000,000	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			315,000,000
3	25	3	1	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	1 Dokumen	50,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	1 Dokumen	15,000,000
3	25	3	1	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kapal yang dibangun dan diserahkan ke kelompok nelayan wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	2 Unit	500,000,000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kapal yang dibangun dan diserahkan ke kelompok nelayan wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	2 Unit	100,000,000
3	25	3	1	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah alat bantu tangkap untuk nelayan	5 unit	300,000,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah alat bantu tangkap untuk nelayan	5 unit	200,000,000
						Jumlah mesin usaha perikanan tangkap yang tersedia	5 unit			Jumlah mesin usaha perikanan tangkap yang tersedia	5 unit	
						Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan tangkap	17 Orang			Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan tangkap	17 Orang	
						Jumlah sarana alat tangkap untuk nelayan	5 unit			Jumlah sarana alat tangkap untuk nelayan	5 unit	
3	25	00	1		<b>Penerbitan Izin</b>			<b>50,000,000</b>	<b>Penerbitan Izin</b>			<b>20,000,000</b>

		3			<b>Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>				<b>Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>						
3	25	3	1	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Dokumen Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	1 Dokumen	10,000,000		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Dokumen Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	1 Dokumen	5,000,000
3	25	3	1	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100 Rekomendasi	30,000,000		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100 Rekomendasi	10,000,000
3	25	3	1	3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	1 Laporan	10,000,000		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	1 Laporan	5,000,000
3	25	003	1		<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil</b>				<b>55,000,000</b>		<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil</b>				<b>20,000,000</b>
3	25	3	1	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk		Jumlah Dokumen Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan	1 Dokumen	10,000,000		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk		Jumlah Dokumen Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan	1 Dokumen	5,000,000

					Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil		Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan di Miliki Oleh Nelayan Kecil			Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil		Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan di Miliki Oleh Nelayan Kecil		
3	25	3	1	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil		Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan di Miliki oleh Nelayan Kecil	150 Rekomendasi	45,000,000	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil		Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan di Miliki oleh Nelayan Kecil	150 Rekomendasi	15,000,000
3	25	003	1	1	<b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>42,500,000</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>13,000,000</b>
3	25	3	1	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah dokumen Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	1 Dokumen	5,000,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah dokumen Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	1 Dokumen	3,000,000
3	25	3	1	2	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	125 Unit	37,500,000	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	125 Unit	10,000,000
3	25	00	1		<b>Penetapan</b>				<b>9,849,000,000</b>	<b>Penetapan</b>				<b>7,450,000,000</b>

		3	.		<b>Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>					<b>Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>				
3	25	3	1	1	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Bone, Palopo, Luwu, Takalar	Jumlah penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan	5 Dokumen	104,403,075	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan		Jumlah penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan	5 Dokumen	50,000,000
3	25	3	1	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Bone, Palopo, Luwu, Takalar	Jumlah Penyediaan Sarana prasarana Pelabuhan Yang Terbangun di Wilayah 1	3 Unit	9,000,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Bone, Palopo, Luwu, Takalar	Jumlah Penyediaan Sarana prasarana Pelabuhan Yang Terbangun di Wilayah 1	3 Unit	7,100,000,000
							Jumlah Penyediaan Sarana prasarana Pelabuhan Yang Terbangun di Wilayah 2	2 Unit				Jumlah Penyediaan Sarana prasarana Pelabuhan Yang Terbangun di Wilayah 2	2 Unit	
3	25	3	1	3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Jumlah Layanan Operasional pelabuhan perikanan wilayah 1	100%	745,500,000	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Jumlah Layanan Operasional pelabuhan perikanan wilayah 1	100%	300,000,000
							Jumlah Layanan Operasional pelabuhan perikanan wilayah 2	100%				Jumlah Layanan Operasional pelabuhan perikanan wilayah 2	100%	
3	25	003	1	1	<b>Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>				<b>25,000,000</b>	<b>Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>				<b>13,000,000</b>
3	25	3	1	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan		Jumlah Dokumen Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin	1 Dokumen	5,000,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan		Jumlah Dokumen Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin	1 Dokumen	3,000,000

					Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT			Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		
3	25	3	1 .	2	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Surat Keterangan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai Dengan 30 GT	20 Surat Keterangan	20,000,000	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Surat Keterangan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai Dengan 30 GT	20 Surat Keterangan	10,000,000
3	25	00 3	1 :	1	<b>Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>7,000,000</b>	<b>Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>5,000,000</b>
3	25	3	1 .	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10		Jumlah Dokumen Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan di Miliki Oleh	1 Dokumen	5,000,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10		Jumlah Dokumen Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan di Miliki Oleh	1 Dokumen	3,000,000

				GT		Nelayan Kecil			GT		Nelayan Kecil		
3	25	3	1 1	2	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Surat Keterangan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	2 Surat Keterangan	2,000,000	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Surat Keterangan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	2 Surat Keterangan	2,000,000	
3	25	00 3	1 1		<b>Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>			<b>10,000,000</b>	<b>Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>			<b>8,000,000</b>	
3	25	3	1 1	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah dokumen Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	1 Dokumen	5,000,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah dokumen Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	1 Dokumen	3,000,000	
3	25	3	1 1	2	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Surat Keterangan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10 Surat Keterangan	5,000,000	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Surat Keterangan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10 Surat Keterangan	5,000,000	
3	25	00 3	1 1		<b>Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			<b>12,000,000</b>	<b>Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			<b>7,000,000</b>	

3	25	3	1 1	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah dokumen Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut,Sungai,danau,waduk,Rawa,dan Genangan air Lainnya Dapat diusahakan Lintasan Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	10,000,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah dokumen Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut,Sungai,danau,waduk,Rawa,dan Genangan air Lainnya Dapat diusahakan Lintasan Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	5,000,000
3	25	3	1 1	2	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Surat Keterangan Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut,Sungai,danau,waduk,Rawa,dan Genangan air Lainnya Dapat diusahakan Lintasan Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Surat Keterangan	2,000,000	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Surat Keterangan Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut,Sungai,danau,waduk,Rawa,dan Genangan air Lainnya Dapat diusahakan Lintasan Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Surat Keterangan	2,000,000
3	25	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>15.198.47 M</b>	<b>28.639.899,034</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>15.198.47 M</b>	<b>8.612.425.400</b>
					<b>Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>4.093.705,8 ton</b>	<b>Produksi Perikanan Budidaya</b>		<b>4.093.705,8 ton</b>			
					<b>Persentase ketersediaan benur berkualitas</b>	<b>100</b>	<b>Persentase ketersediaan benur berkualitas</b>		<b>100</b>			
3	25	00	1		<b>Penerbitan Izin</b>			<b>60.000.000</b>	<b>Penerbitan Izin</b>			<b>36,000,000</b>

		4			Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
3	25	4	1	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		umlah dokumen Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	5,000,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		umlah dokumen Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	3,000,000
3	25	4	1	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5 Rekomendasi	5,000,000	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5 Rekomendasi	3,000,000
3	25	4	1	3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan		umlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	1 Laporan	50,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan		umlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	1 Laporan	30,000,000
3	25	004	1		<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</b>				<b>15,000,000</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</b>				<b>8,000,000</b>
3	25	4	1	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang		Jumlah dokumen Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang	1 Dokumen	5,000,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang		Jumlah dokumen Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang	1 Dokumen	3,000,000

					Pembudidayaan Ikan		Pembudidayaan Ikan			Pembudidayaan Ikan		Pembudidayaan Ikan		
3	25	4	1	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan	1 Rekomendasi	10,000,000	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan		Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan	1 Rekomendasi	5,000,000
3	25	004	1		<b>Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</b>				<b>7,000,000</b>	<b>Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</b>				<b>5,000,000</b>
3	25	4	1	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT		Jumlah dokumen Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT	1 Dokumen	5,000,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT		Jumlah dokumen Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT	1 Dokumen	3,000,000
3	25	4	1	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT		Jumlah rekomendasi Izin kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai dengan 30 GT	2 Rekomendasi	2,000,000	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT		Jumlah rekomendasi Izin kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai dengan 30 GT	2 Rekomendasi	2,000,000
3	25	004	1		<b>Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah</b>				<b>15,000,000</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah</b>				<b>8,000,000</b>

					<b>Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>					<b>Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				
3	25	4	1	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah dokumen Persyaratan dan Prosedur PenerbitanTanda daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) DI Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dalam provinsi	1 Dokumen	5,000,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah dokumen Persyaratan dan Prosedur PenerbitanTanda daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) DI Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dalam provinsi	1 Dokumen	3,000,000
3	25	4	1	2	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Surat Keterangan Tanda daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) DI Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dalam provinsi	100 Surat Keterangan	10,000,000	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Surat Keterangan Tanda daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) DI Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dalam provinsi	100 Surat Keterangan	5,000,000
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>004</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>				<b>15,171,431,960</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>				<b>8,647,063,893</b>
3	25	4	1	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	50,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	30,000,000
3	25	4	1	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah kebun laut yang tersedia	3 Unit	3.517,500,000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah kebun laut yang tersedia	3 Unit	2,097,063,893
							Jumlah sarana prasarana budidaya laut	130 unit				Jumlah sarana prasarana budidaya laut	130 unit	
3	25	4	1	3	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya		Jumlah Prasarana Budidaya yang terbangun	2 Unit	8,617,467,074	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya		Jumlah Prasarana Budidaya yang terbangun	2 Unit	1,700,000,000

					Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
						Jumlah Prasarana Perbenihan Yang di operasionalkan	2 Unit				Jumlah Prasarana Perbenihan Yang di operasionalkan	2 Unit	
3	25	4	1 .	4	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah induk unggul untuk menghasilkan benih	750 ekor	215,250,000		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah induk unggul untuk menghasilkan benih	750 ekor	150,000,000
3	25	4	1 .	5	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah diseminasi inovasi teknologi budidaya udang windu berbasis kawasan (WINDU BANGKIT	130 Unit	15,171,431,960		Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah diseminasi inovasi teknologi budidaya udang windu berbasis kawasan (WINDU BANGKIT	130 Unit	4,500,000,000
						Jumlah Sarana dan Prasarana Perbenihan yang di operasionalkan	8 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Perbenihan yang di operasionalkan	8 Unit	
3	25	4	1 .	6	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Kualitas Lingkungan Perikanan Budidaya Perbenihan	13 Unit	147,000,000		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	umlah Pengendalian Kualitas Lingkungan Perikanan Budidaya Perbenihan	13 Unit	70,000,000
3	25	4	1 .	7	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di	Jumlah laporan pembinaan dan pemantauan Pembudidayaan	1 Laporan	824,250,000		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di	Jumlah laporan pembinaan dan pemantauan Pembudidayaan	1 Laporan	100,000,000

					Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi			Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi		
3	25	5			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		<b>Persentase penurunan Tindakan IUU Fishing Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</b>		8.926.999.860.84	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			4.294.830.200	
3	25	005	1		<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>				8.706.999.860.84	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>			7,460,000,000	
3	25	5	1	1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		Jumlah jenis Biota laut yang dilindungi	1 Jenis	108.807.096.84	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		Jumlah jenis Biota laut yang dilindungi	1 Jenis	80,000,000
							Jumlah laporan pengawasan terpadu	1 Laporan				Jumlah laporan pengawasan terpadu	1 Laporan	
							Jumlah peserta koordinasi teknis pengawasan dan pengendalian SDKP	120 Orang				Jumlah peserta koordinasi teknis pengawasan dan pengendalian SDKP	120 Orang	
							Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan	30 Orang				Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan	30 Orang	
3	25	5	1	2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		Jumlah peserta sosialisasi dan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi	100 Unit	8.478.192.764	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil		Jumlah peserta sosialisasi dan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi	100 Unit	7,300,000,000
							Jumlah sarana	33 Unit				Jumlah sarana	33 Unit	



					dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya		dan Genangan Air Lainnya			dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya		Genangan Air Lainnya		
							Jumlah usaha perikanan tangkap pada Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang mendapatkan pengawasan	1 Unit				Jumlah usaha perikanan tangkap pada Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang mendapatkan pengawasan	1 Unit	
3	25	5	1	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya		Jumlah usaha pembudidaya ikan di perairan umum yang mendapatkan pengawasan	1 Unit	50,000,000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya		Jumlah usaha pembudidaya ikan di perairan umum yang mendapatkan pengawasan	1 Unit	25,000,000
3	25	5	1	3	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah usaha pemasaran dan pengolahan ikan yang mendapatkan pengawasan	1 Unit	60,000,000	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah usaha pemasaran dan pengolahan ikan yang mendapatkan pengawasan	1 Unit	25,000,000
3	25	6			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>		<b>Produksi Olahan Konsumsi dan non Konsumsi</b>  <b>Persentase Pengujian mutu produk perikanan</b>		<b>2,624,427,923</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>				<b>1.171.882.800</b>



					<b>Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>					<b>Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>				
3	25	6	1	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Fasilitas dan Bimbingan pada produk perikanan yang berdaya saing	70 Unit usaha	352,326,000		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Fasilitas dan Bimbingan pada produk perikanan yang berdaya saing	70 Unit usaha	150,000,000	
						Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi olahan	60 Orang				Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi olahan	60 Orang		
						Jumlah promosi yang diikuti	2 Kegiatan Promosi				Jumlah promosi yang diikuti	2 Kegiatan Promosi		
						Jumlah sarana prasarana pengolahan sesuai standar usaha	1 Unit				Jumlah sarana prasarana pengolahan sesuai standar usaha	1 Unit		
3	25	6	1	2	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Inovasi Teknologi Produk Olahan Hasil KP Konsumsi dan Non Konsumsi	4 Jenis Produk Inovasi	2.148.601.923		Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Inovasi Teknologi Produk Olahan Hasil KP Konsumsi dan Non Konsumsi	4 Jenis Produk Inovasi	900,000,000	
						Jumlah laporan penerapan prosedur mutu	1 Jenis				Jumlah laporan penerapan prosedur mutu	1 Jenis		
						Jumlah Sampel Produk yang Dilakukan Pengujian Mutu	100 Hasil Uji Mutu				Jumlah Sampel Produk yang Dilakukan Pengujian Mutu	100 Hasil Uji Mutu		

						Jumlah Unit Usaha Pengolah Yang Mendapatkan Pengembangan mutu produk	100 UPI			Jumlah Unit Usaha Pengolah Yang Mendapatkan Pengembangan mutu produk	100 UPI	
						Jumlah validasi sarana prasarana laboratorium pengujian	5 Unit			Jumlah validasi sarana prasarana laboratorium pengujian	5 Unit	
3	25	006	1		<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			<b>80,000,000</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			<b>45,000,000</b>
3	25	6	1	1	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	50,000,000	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	20,000,000
3	25	6	1	3	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	10,000,000	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	25,000,000
<b>TOTAL</b>								<b>102.739.562.704</b>				<b>76.988.055.667</b>

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan. Program kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan/desa, Musrenbang tingkat Kabupaten/kota sampai Musrenbang tingkat Provinsi. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Forum Perangkat Daerah terdapat beberapa usulan dari Kabupaten/Kota sehingga dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel .2.14 .**  
**(Tabel T-C.32 Sesuai lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4		5	6
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Dusun Toro, Kab. Luwu, Padang Kalua	pembangunan tambatan perahu	50 meter	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - surat keterangan dari lurah setempat - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 50 meter Anggaran : 250000000	Rekomendasi : Membutuhkan pembangunan tambatan perahu (sarana dan prasarana perikanan) Koefisien : 50 meter Anggaran : 0
2	Peningkatan Kawasan Konversi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pangkep, Kab. Pangkajene Kepulauan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Pengadaan peralatan selam di KKPD Pangkajene dan kepulauan	1 paket	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi kawasan konservasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok konservasi Koefisien : 1 Set Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Membutuhkan Peningkatan Kawasan Konversi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (pealatan selam ) Koefisien : 1 Set Anggaran : 0
3	Peningkatan Kawasan Konversi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pulau sanane, Kab. Pangkajene Kepulauan, Liukang Tupabbiring, Mattaro Adae	Tambatan perahu	1 paket	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - surat keterangan dari lurah setempat - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 1 Unit Anggaran : 250000000	Rekomendasi : Membutuhkan tambatan perahu Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0
4	Peningkatan Kawasan Konversi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pangkep, Kab. Pangkajene Kepulauan, Liukang Tupabbiring, Liukang Tupabbiring, Seluruh	Transplantasi karang	1 paket	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan	Rekomendasi : Membutuhkan Transplantasi karang Koefisien : 1 paket Anggaran : 0

		Kelurahan/Desa			kemampuan keuangan daerah Koefisien : 1 paket Anggaran : 185000000	
5	Peningkatan Kawasan Konversi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pangkep, Kab. Pangkajene Kepulauan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Pantai berseri CDK Pangkep	1 kegiatan	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - surat keterangan dukungan dari pemda setempat - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan Kegiatan Pantai berseri CDK Pangkep Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 0
6	Peningkatan Kawasan Konversi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pangkep, Kab. Pangkajene Kepulauan, Liukang Tupabbiring, Mattiro Bone	Apartemen ikan	1 paket	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan peningkatan kawasan konversi di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil (pembuatan apartemen ikan) Koefisien : 1 paket Anggaran : 0
7	Peningkatan Pengawasan Usaha Kelautan dan Perikanan	Pangkep, Kab. Pangkajene Kepulauan, Liukang Tupabbiring, Liukang Tupabbiring, Seluruh Kelurahan/Desa	Pengadaan perahu pokmaswas	1 paket	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 1 Unit Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan pengadaan perahu pokmaswas Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0
8	Peningkatan Pengawasan Usaha Kelautan dan Perikanan	Pangkep, Kab. Pangkajene Kepulauan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Patroli sumberdaya kelautan dan perikanan	1 kegiatan	Rekomendasi : - kebutuhan bahan bakar - speedboat Koefisien : 1 Kali Patroli Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Membutuhkan kegiatan Patroli sumberdaya kelautan dan perikanan Koefisien : 1 Kali Patroli Anggaran : 0
9	Peningkatan Pengawasan Usaha Kelautan dan Perikanan	Pangkep, Kab. Pangkajene Kepulauan, Liukang Tupabbiring, Liukang Tupabbiring, Seluruh Kelurahan/Desa	Sosialisasi IUU Fishing	1 kegiatan	Rekomendasi : lengkapi TOR/KAK Koefisien : 1 Kali Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Membutuhkan kegiatan sosialisasi Koefisien : 1 Kali Anggaran : 0
10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Dusun Benteng, Kab. Luwu Timur, Wotu, Lampenai	Bantuan Peralatan Budi daya Rumput Laut jenis Katonik	1 Kelompok	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana

					proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : 200000000	perikanan (peralatan budidaya rumput laut jenis katonik) Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : 0
11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Dusun Setia Kawan, Kab. Luwu Timur, Wotu, Wotu, Seluruh Kelurahan/Desa	Bantuan Peralatan Budidaya Rumput Laut Jenis Katonik	1 Kelompok	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan (peralatan budidaya rumput laut jenis katonik) Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : 0
12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Dusun Sambote, Kab. Luwu Timur, Bawalipu	Bantuan Peralatan Budidaya Rumput Laut jenis Katonik	1 Kelompok	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan (peralatan budidaya rumput laut jenis katonik) Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : 0

13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Kabupaten Takalar, Kab. Takalar, Galesong Utara, Galesong Utara, Seluruh Kelurahan/Desa	Bantuan alat tangkap Gillnet bagi kelompok Nelayan	300 piece	Rekomendasi : Penyediaan sarpras perikanan tangkap- dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 30 paket Anggaran : 300000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( alat tangkap gillnet) Koefisien : 300 paket Anggaran : 0
14	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Kabupaten Takalar, Kab. Takalar, Galesong Selatan, Galesong Selatan, Seluruh Kelurahan/Desa	Bantuan alat tangkap Gillnet bagi kelompok Nelayan	250 piece	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 25 paket Anggaran : 250000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( alat tangkap gillnet) Koefisien : 250 paket Anggaran : 0
15	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Kabupaten Takalar, Kab. Takalar, Galesong, Galesong, Seluruh Kelurahan/Desa	Bantuan alat tangkap Gillnet bagi kelompok Nelayan	250 piece	Rekomendasi : Penyediaan sarpras perikanan tangkap- dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 25 paket Anggaran : 250000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( alat tangkap gillnet) Koefisien : 250 paket Anggaran : 0

16	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Kabupaten Takalar, Kab. Takalar, Galesong Utara, Galesong Utara, Seluruh Kelurahan/Desa	Bantuan Mesin kapal untuk kelompok nelayan	10 buah	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir - 24 PK Koefisien : 10 buah Anggaran : 500000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan (mesin kapal) Koefisien : 10 buah Anggaran : 0
17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Kabupaten Takalar, Kab. Takalar, Galesong Selatan, Galesong Selatan, Seluruh Kelurahan/Desa	bantuan Mesin Kapal untuk kelompok nelayan	10 Buah	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir - 24 PK Koefisien : 10 Unit Anggaran : 500000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan (mesin kapal) Koefisien : 10 Unit Anggaran : 0
18	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Kabupaten Takalar, Kab. Takalar, Galesong, Galesong, Seluruh Kelurahan/Desa	Bantuan Mesin Kapal Untuk Kelompok Nelayan	20 Buah	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir - 24 PK Koefisien : 20 Unit Anggaran : 1000000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan (mesin kapal) Koefisien : 20 Unit Anggaran : 0

19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Kabupaten, Kab. Takalar, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Bantuan Jaring pancing Rawai	250 piece	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 250 paket Anggaran : 250000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan (jaring pancing rawai) Koefisien : 250 paket Anggaran : 0
20	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Kabupaten Takalar, Kab. Takalar, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Bantuan GPS Fishfender untuk kelompok nelayan sebagai penunjang hasil tangkapan	20 buah	Rekomendasi : - Siapkan dokumen kelengkapan kelompok - proposal - SKT Koefisien : 20 buah Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan (GPS Fishfender ) Koefisien : 20 buah Anggaran : 0
21	Peningkatan Kawasan Konversi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	kalupenrang, Kab. Maros, Bontoa, Minasupa	bantuan bibit mangrove KT. Tani Hutan Sumber Baru	1000 pohon	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 1000 batang Anggaran : 40000000	Rekomendasi : Membutuhkan prasarana pertanian ( Pengembangan Jalan Tani) Koefisien : 1000 batang Anggaran : 0
22	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Dusun Campagayya, Desa Tupabiring, Kec. Bontoa, Kab. Maros, Bontoa, Tuppabiring	Bantuan Alat Mesin 24 PK dan Alat Tangkap Kelompok Usaha Bersama KARYA BERSATU	1 Unit	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 10 Unit Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan (alat mesin 24 pk dan alat tangkap) Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0

23	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Dusun Campagayya, Desa Tupabiring, Kec. Bontoa, Kab. Maros, Kab. Maros, Bontoa, Tuppabiring	Bantuan Alat Tangkap Kelompok Usaha Bersama TUDANG SIPULUNG	1 PAKET	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir - koordinasikan dengan OPD terkait bantuan alat yang diminta Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( alat tangkap) Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 0
24	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Desa Mattiro Kanja, Kec. Liukang Tupabbiring Utara, Kab. Pangkep, Kab. Pangkajene Kepulauan, Liukang Tupabbiring Utara, Mattiro Kanja	Bantuan Alat Tangkap Kelompok Perempuan Pulau	1 PAKET	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir - koordinasikan dengan OPD terkait bantuan alat yang diminta Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( alat tangkap) Koefisien : 1 PAKET Anggaran : 0
25	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Kecamatan Arungkeke Kab. Jeneponto, Kab. Jeneponto, Arungkeke, Arungkeke, Seluruh Kelurahan/Desa	pembangunan gudang usaha garam beryodium	1 unit	Rekomendasi : - Siapkan dokumen kelengkapan kelompok - proposal - SKT - sesuaikan dengan ketersediaan anggaran Koefisien : 1 unit Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan pembangunan gudang usaha garam beryodium Koefisien : 1 unit Anggaran : 0
26	Pengembangan Budidaya Perikanan	dusun cambaya desa tompotana, Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Tompotana	usulan pengadaan sarana dan prasarana rumput laut klp. mandiri bersama	10 paket	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok	Rekomendasi : Membutuhkan budidaya perikanan ( rumput laut) Koefisien : 10 paket Anggaran : 0

					- belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 10 paket Anggaran : 30000000	
27	Pengembangan Budidaya Perikanan	dusun lantangpeo desa rewataya, Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Rewataya	usulan pengadaan sarana dan prasarana rumput laut klp. Sitallassi	10 paket	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 10 paket Anggaran : 30000000	Rekomendasi : Membutuhkan budidaya perikanan ( rumput laut) Koefisien : 10 paket Anggaran : 0
28	Pengembangan Budidaya Perikanan	dusun dandedandere desa maccini baji, Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Maccini Baji	usulan pengadaan sarana dan prasarana rumput laut klp. Abbulo sibatang	10 paket	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 10 paket Anggaran : 30000000	Rekomendasi : Membutuhkan budidaya perikanan ( rumput laut) Koefisien : 10 paket Anggaran : 0
29	Pengembangan Budidaya Perikanan	desa rewataya, Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Rewataya	usulan pengadaan sarana dan prasarana rumput laut klp. Sepakat	10 paket	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 10 paket Anggaran : 30000000	Rekomendasi : Membutuhkan budidaya perikanan ( rumput laut) Koefisien : 10 paket Anggaran : 0
30	Pengembangan Budidaya Perikanan	dusun tompotana desa tompotana, Kab. Takalar, Kepulauan	usulan pengadaan sarana dan prasarana rumput laut klp. Harapan	10 paket	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi	Rekomendasi : Membutuhkan budidaya perikanan (

		Tanakeke, Tompotana	mandiri		proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 10 paket Anggaran : 30000000	rumput laut) Koefisien : 10 paket Anggaran : 0
31	Pengembangan Budidaya Perikanan	desa mangarabombang, Kab. Takalar, Mangarabombang, Laikang	penanaman mangrove	40000 batang	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - surat keterangan dukungan dari pemda setempat - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 40000 batang Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan Budidaya Perikanan penanaman mangrove Koefisien : 40000 batang Anggaran : 0
32	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Satanger, Kab. Pangkajene Kepulauan, Liukang Tangaya, Satanger	Bantuan Kapal Penangkap Ikan 7 GT, Kelompok Mitra Abadi	5 unit	Rekomendasi : - cek kelengkapan proposal - sesuaikan kemampuan keuangan daerah - dibutuhkan titik koordinasi/lokasi Koefisien : 5 unit Anggaran : 1500000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan (kapal penangkap ikan 7 GT) Koefisien : 5 unit Anggaran : 0
33	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Dusun Pandang, Kab. Kepulauan Selayar, Pasimasunggu Timur, Bontobulaeng	Pengadaan Kapal Bagang Kelompok Nelayan Usaha Bersama	1 Unit	Rekomendasi : - Siapkan dokumen kelengkapan kelompok - proposal dilengkapi dengan titik koordinat - SKT - perjelas jenis bagang Koefisien : 1 Unit Anggaran : 2500000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( kapal bagang) Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0
34	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Dusun Bonepute, Kab. Luwu, Larompong Selatan, Bone Pute	pembangunan bagang apung	2 unit	Rekomendasi : - Siapkan dokumen kelengkapan kelompok - proposal dilengkapi dengan titik koordinat - SKT - perjelas jenis bagang Koefisien : 2 unit Anggaran : 2500000000	Rekomendasi : Membutuhkan pembangunan bagang apung Koefisien : 2 unit Anggaran : 0
35	Peningkatan	dusun pantai	bantuan budidaya	10 ton	Rekomendasi :	Rekomendasi :

	Sarana dan Prasarana Perikanan	bahari, Kab. Luwu, Bua, Raja	rumput laut		Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di laut- dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 10 Paket Anggaran : 300000000	Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( budidaya rumput laut) Koefisien : 10 Paket Anggaran : 0
36	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	dusun petang, Kab. Jeneponto, Arungkeke, Arungkeke	alat tangkap Nelayan	1 unit	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir - koordinasikan dengan OPD terkait jenis alat tangkap nelayan yang diminta Koefisien : 1 unit Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan (alat tangkap nelayan) Koefisien : 1 unit Anggaran : 0
37	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	dusun banawa, Kab. Luwu, Bua, Pammesakang	bantuan budidaya rumput laut	10 ton	Rekomendasi : Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di laut- dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 10 Paket Anggaran : 300000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( budidaya rumput laut) Koefisien : 10 Paket Anggaran : 0
38	Peningkatan	Kel. Letta, Kec.	Pengadaan sarana	1 unit	Rekomendasi : -	Rekomendasi :

	Sarana dan Prasarana Perikanan	Bantaeng, Kab. Bantaeng, Kab. Bantaeng, Letta	pemasaran perikanan: 1. Kendaraan Roda Tiga 2. Chest Freezer 3. Cool Box masing-masing 1 unit		Siapkan dokumen kelengkapan kelompok - proposal dilengkapi dengan titik koordinat - SKT - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - jenis pengadaan seperti ini belum ada Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Membutuhkan sarana perikanan kendaraan roda tiga dan chest freezer 3 cool box Koefisien : 1 paket Anggaran : 0
39	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	pare-pare, Kota Pare Pare, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Bantuan alat tangkap dan perahu bagi kelompok nelayan di kota pare-pare.	1 ls	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 1 paket Anggaran : 1000000000	Rekomendasi : Membutuhkan alat tangkap dan perahu bagi kelompok nelayan Koefisien : 1 paket Anggaran : 0
40	Pengembangan Budidaya Perikanan	Pulau Sembilan, Kab. Sinjai, Pulau Sembilan, Pulau Harapan	Pengadaan Bibit rumput Laut	1	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan Bibit rumput Laut Koefisien : 1 paket Anggaran : 0
41	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Mattiro somepe, Kab. Pangkajene Kepulauan, Liukang Tupabbiring, Liukang Tupabbiring, Seluruh Kelurahan/Desa	Bantuan mesin perahu untuk nelayan di pulau balang lombo, Kel. Mattiro Somepe	1 ls	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan (mesin perahu untuk nelayan ) Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0

					mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 1 Unit Anggaran : 50000000	
42	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	sarappo, Kab. Pangkajene Kepulauan, Liukang Tupabbiring, Mattiro Langi	Bantuan mesin perahu untuk nelayan	1 ls	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir - 24 PK Koefisien : 1 unit Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasaran perikanan (mesin perahu untuk nelayan) Koefisien : 1 unit Anggaran : 0
43	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	DUSUN PADANG KALUA, Kab. Luwu, Bua, Padang Kalua	TAMBATAN PERAHU	40 METER	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - surat keterangan dari lurah setempat - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 40 METER Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan Sarana dan Prasarana Perikanan (tambahan perahu ) Koefisien : 40 METER Anggaran : 0
44	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	JL. BENTENG RAYA, Kota Palopo, Wara Timur, Benteng	PENANAMAN BIBIT MANGROVE	10.000 UNIT	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - surat keterangan dukungan dari pemda setempat - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 10000 batang Anggaran : 400000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( penanaman bibit mangrove) Koefisien : 10 batang Anggaran : 0
45	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	JL. PANTAI 1, Kota Palopo, Wara Selatan, Songka	PENANAMAN BIBIT MANGROVE	10.000 UNIT	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - surat keterangan dukungan dari pemda setempat - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 10000 batang Anggaran : 50000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( penanaman bibit mangrove) Koefisien : 10 batang Anggaran : 0

46	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Dusun Bajang, Kab. Bulukumba, Herlang, Gunturu	Pengadaan Kapal 5 GT	1	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 1 unit Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan Sarana dan Prasarana Perikanan (Kapal 5 GT) Koefisien : 1 unit Anggaran : 0
47	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Dusun Pandang, Kab. Kepulauan Selayar, Pasimasunggu Timur, Bontobulaeng	Pengadaan Keramba Jaringan Apung Kelompok Nelayan Usaha Bersama	1 Paket	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( pengadaan keramba jaringan apung ) Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0
48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Dusun Pandang, Kab. Kepulauan Selayar, Pasimasunggu Timur, Bontobulaeng	Pengadaan Rumpon Kelompok Nelayan Usaha Bersama	10 Unit	Rekomendasi : - untuk diperjelas jenis rumpon - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 10 Unit Anggaran : 350000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( rumpon ) Koefisien : 10 Unit Anggaran : 0
49	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Dusun Pandang Tengah, Kab. Kepulauan Selayar, Pasimasunggu Timur, Bontobulaeng	Pengadaan Keramba Jaring Apung Kelompok Nelayan Maju Bersama	1 Paket	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana pertanian ( keramba jaring apung ) Koefisien : 1 Paket Anggaran

					- memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	: 0
50	Peningkatan Kawasan Konversi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Balo-balo, Kab. Luwu Timur, Balobalo	terjadinya abrasi sepanjang pantai yang sudah memasuki areal pemukiman masyarakat	500 meter	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - rubah volume kegiatan menjadi berapa batang Koefisien : 500 meter Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan pembangunan talud pemecah ombak dipesisir pantai Koefisien : 500 meter Anggaran : 0
51	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	pantai lemo, Kab. Luwu Timur, Burau, Mabonta	bantuan peralatan bagi masyarakat petani budidaya rumput laut Katonik	2 Kelompok	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 2 paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan (budidaya rumput laut katonik) Koefisien : 2 paket Anggaran : 0
52	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	desa sadar, Kab. Luwu Utara, Bone Bone, Sadar	Bantuan peralatan nelayan	1 Kelompok	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan (peralatan nelayan ) Koefisien : 1 Kelompok Anggaran : 0
53	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Jalan Bahari, Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu	Bantuan Kapal Dan Alat Tangkap bagi nelayan Tangkap kapasitas 14 Ton	1 Kelompok	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - sesuaikan	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana

			kelompok Pelagi Nusantara		dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 1 Unit Anggaran : 750000000	perikanan (kapal dan alat tangkap kapasitas 14 ton) Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0
54	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Kec. Malangke, kabupaten luwu utara, Kab. Luwu Utara, Malangke, Malangke	Permintaan bantuan pengadaan perahu dan alat tangkap	9999999 unit	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan (pengadaan perahu dan alat tangkap ) Koefisien : 9999999 paket Anggaran : 0
55	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Tamalate, Kota Makassar, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	PENGADAAN ALAT TANGKAP IKAN	2 Kelompok	Rekomendasi : - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 2 paket Anggaran : 400000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana (alat tangkap ikan ) Koefisien : 2 paket Anggaran : 0
56	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Tamalate, Kota Makassar, Tamalate, Tamalate, Seluruh Kelurahan/Desa	PENGADAAN MESIN KAPAL 27 PK	20 Unit	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 20 Unit Anggaran : 1000000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan (mesin kapal 27 PK) Koefisien : 20 Unit Anggaran : 0
57	Pengembangan Budidaya Perikanan	LINGKUNGAN CENRANAE, Kab. Wajo, Sajoanging, Akkajeng	BANTUAN TALI BUDIDAYA RUMPUT LAUT	2 KELOMPOK	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi	Rekomendasi : Membutuhkan budidaya perikanan (tali

					<p>proposal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah</li> <li>- memiliki kelompok</li> <li>- belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir</li> </ul> <p>Koefisien : 2 KELOMPOK Anggaran : 60000000</p>	<p>budidaya rumput laut) Koefisien : 2 KELOMPOK Anggaran : 0</p>
58	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Jl. Bakau, Kota Palopo, Bara, Balandai	PENANAMAN MANGROVE	10000 bibit	<p>Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- surat keterangan dukungan dari pemda setempat</li> <li>- sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah</li> </ul> <p>Koefisien : 10000 batang Anggaran : 50000000</p>	<p>Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan (penanaman mangrove)</p> <p>Koefisien : 10000 batang Anggaran : 0</p>
59	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	makassar, Kota Makassar, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	penanaman bibit mangrove CDK MAMMINASATA	40000 buah	<p>Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- surat keterangan dukungan dari pemda setempat</li> <li>- sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah</li> </ul> <p>Koefisien : 100000 batang Anggaran : 50000000</p>	<p>Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan (penanaman bibit mangrove cdk mamminasata)</p> <p>Koefisien : 40000 batang Anggaran : 0</p>
60	Pengembangan Budidaya Perikanan	sangalla, Kab. Tana Toraja, Sangalla Utara, Saluallo	Bibit dan permodalan ikan mas	10000 1	<p>Rekomendasi : Dapat diakomodir dengan pertimbangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cek kelengkapan dokumen pendukung seperti proposal, nama kelompok, lokasi, dsb</li> <li>- Koordinasikan dengan pengusul kegiatan yang akan dilaksanakan</li> <li>- Sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah</li> </ul> <p>Koefisien : 10000 bibit Anggaran : 200000000</p>	<p>Rekomendasi : Membutuhkan prasarana peternakan (bibit dan permodalan ikan mas)</p> <p>Koefisien : 10000 bibit Anggaran : 0</p>
61	Peningkatan Sarana dan	Dusuns Podo Makmur, Kab.	Bantuan Alat Tangkap Dan	1 Unit	<p>Rekomendasi : Penyediaan</p>	<p>Rekomendasi : Membutuhkan</p>

	Prasarana Perikanan	Luwu Timur, Malili, Lakawali	Perahu Nelayan		sarpras perikanan tangkap- dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 1 paket Anggaran : 350000000	sarana dan prasarana perikanan (alat tangkap dan perahu nelayan) Koefisien : 1 paket Anggaran : 0
62	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	larompong selatan kabupaten luwu, Kab. Luwu, Larompong Selatan, Larompong Selatan, Seluruh Kelurahan/Desa	pengadaan kapal 10 GT demi meningkatkan kesejahteraan nelayan yang ada di kabupaten luwu	1 Unit	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 1 Unit Anggaran : 500000000	Rekomendasi : Memutuskan Sarana dan Prasarana Perikanan ( kapal 10 GT) Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0
63	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	larompong, Kab. Luwu, Larompong, Larompong, Seluruh Kelurahan/Desa	pengadaan kapal 5 gt agar perekonomian nelayan dapat meningkat	1 unit	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 1 unit Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( kapal 5 GT) Koefisien : 1 unit Anggaran : 0
64	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto, Arungkeke, Arungkeke, Seluruh Kelurahan/Desa	alat tangkap ikan	5 unit	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( alat tangkap ikan ) Koefisien : 5 paket Anggaran : 0

					- belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir - koordinasikan dengan pengusul terkait alat yang akan diusul Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	
65	Peningkatan Pengawasan Usaha Kelautan dan Perikanan	SINJAI, Kab. Sinjai, Sinjai Timur, Tongke-Tongke	BANTUAN PENYEDIAAN BIBIT MANGROVE	1 PAKET	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 1 batang Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Membutuhkan Pengawasan Usaha Kelautan dan Perikanan (penyediaan bibit mangrove) Koefisien : 100 batang Anggaran : 0
66	Peningkatan Pengawasan Usaha Kelautan dan Perikanan	SINJAI, Kab. Sinjai, Pulau Sembilan, Pulau Buhung Pitue	BANTUAN PENGADAAN TAMBATAN PERAHU	1 PAKET	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - surat keterangan dari lurah setempat - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 1 unit Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan peningkatan usaha kelautan dan perikanan (tambatan perahu) Koefisien : 1 unit Anggaran : 0
67	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	tamarunang, mariso, kota makassar sulawesi selatan, Kota Makassar, Mariso, Tamarunang	pengadaan kapal kelompok nelayan nuri bahari	1 unit	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 1 unit Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan (pengadaan kapal) Koefisien : 1 unit Anggaran : 0
68	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	barombong, tamalate, makassar sulawesi selatan, Kota Makassar, Tamalate, Barombong	bantuan kapal kelompok nelayan terumbu bale	1 unit	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan (bantuan kapal) Koefisien : 1 unit Anggaran : 0

					- memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 1 unit Anggaran : 200000000	
69	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Desa munte kecamatan tanalili, kabupaten luwu utara, Kab. Luwu Utara, Tana Lili, Munte	Permintaan bantuan alat tangkap dan perahu untuk warga nelayan	5 unit	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 5 unit Anggaran : 1000000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( alat tangkap dan perahu ) Koefisien : 5 unit Anggaran : 0
70	Pengembangan Budidaya Perikanan	Malangke Barat, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Utara, Malangke Barat, Malangke Barat, Seluruh Kelurahan/Desa	permintaan bantuan alat budidaya rumput laut seperti tali dan perlengkapan lainnya	10 set	Rekomendasi : Penyediaan perasarana ikan di laut- dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 10 paket Anggaran : 30000000	Rekomendasi : Membutuhkan budidaya perikanan (alat budidaya rumput laut) Koefisien : 10 paket Anggaran : 0
71	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Jalang, Kab. Wajo, Sajoanging, Akkajeng	Bantuan Pengadaan Alat Tangkap Ikan, Mesin 24 GT dan Perlengkapan Lainnya untuk KUB. Sinar Laut	1 Paket	Rekomendasi : Penyediaan sarpras perikanan tangkap- dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan (Alat Tangkap Ikan, Mesin 24 GT dan Perlengkapan Lainnya ) Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0

					tahun terakhir Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1500000000	
72	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	KAJANG, Kab. Bulukumba, Kajang, Lolisang	PENGADAAN KAPAL ALAT TANKAP IKAN	1 Paket	Rekomendasi : - Siapkan dokumen kelengkapan kelompok - proposal dilengkapi dengan titik koordinat - SKT Koefisien : 1 Unit Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( kapal alat tangkap ikan ) Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0
73	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	HERLANG, Kab. Bulukumba, Herlang, Herlang, Seluruh Kelurahan/Desa	PENGADAAN KAPAL ALAT TANKAP IKAN	1 Paket	Rekomendasi : - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 1 Unit Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( kapal alat tangkap ikan ) Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0
74	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	MATEKKO, Kab. Bulukumba, Gantorang, Matekko	PENGADAAN KAPAL ALAT TANKAP IKAN	1 Paket	Rekomendasi : - Siapkan dokumen kelengkapan kelompok - proposal dilengkapi dengan titik koordinat - SKT - sesuaikan dengan ketersediaan anggaran Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( kapal alat tangkap ikan ) Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0
75	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	kelompok nelayan reseki ilahi, Kab. Luwu, Bua, Pammesakang	Mata pecaharian Penduduk Desa pammesakang mayoritas adalah nelayan salah satunya yang paling digeluti yaitu bagang tancap, persoalan yang sangat mendasar bagi nelayan didesa tersebut terkhusus kelompok nelayan reseki ilahi adalah kurangnya modal untuk mendirikan bagang tancap oleh karena itu dibutuhkan bantuan	1 unit	Rekomendasi : - Lengkapi dokumen pendukung seperti proposal, lokasi, dsb - sesuaikan dengan dokumen perencanaan - Sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah Koefisien : 1 unit Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( bagang tancap ) Koefisien : 1 unit Anggaran : 0

			pengadaan bangang tancap.			
76	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	DESA GALESONG BARU, Kab. Takalar, Galesong, Galesong Baru	PENGADAAN KAPAL VIBER UNTUK KELOMPOK LAUT YANG SANGAT DIBUTUHKAN MASYARAKAT DALAM Mencari MATA Pencarian Yang Sebagian Besar Profesi Mereka Di NELAYAN	30 UNIT	Rekomendasi : - Lengkapi dokumen pendukung seperti proposal, lokasi, dsb - sesuaikan dengan dokumen perencanaan - Sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah Koefisien : 30 UNIT Anggaran : 2250000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan (kapal viber) Koefisien : 30 UNIT Anggaran : 0
77	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	DUSUN BAYOWA, Kab. Takalar, Galesong, Galesong Kota	PENGADAAN KAPAL VIBER UNTUK KELOMPOK LAUT YANG SANGAT DIBUTUHKAN MASYARAKAT DALAM Mencari MATA Pencarian Yang Sebagian Besar Profesi Mereka Di NELAYAN	30 UNIT	Rekomendasi : - Lengkapi dokumen pendukung seperti proposal, lokasi, dsb - sesuaikan dengan dokumen perencanaan - Sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah Koefisien : 30 UNIT Anggaran : 2250000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( kapal viber) Koefisien : 30 UNIT Anggaran : 0
78	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	baju bodoa, Kab. Maros, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Bantuan Cool Box ukuran 100 Liter	200 unit	Rekomendasi : - Lengkapi dokumen pendukung seperti proposal, lokasi, dsb - sesuaikan dengan dokumen perencanaan - Sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah Koefisien : 200 unit Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan (cool box ukuran 100 liter) Koefisien : 200 unit Anggaran : 0
79	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	buloa, Kota Makassar, Tallo, Buloa	pengadaan tambatan perahu	1 unit	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - surat keterangan dari lurah setempat - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 1 unit Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( tambatan perahu) Koefisien : 1 unit Anggaran : 0
80	Peningkatan Sarana dan Prasarana	pulau kodingareng, Kota Makassar, Kepulauan	pengadaan perahu pokmaswas kelompok pasir	1 unit	Rekomendasi : - Lengkapi dokumen	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan

	Perikanan	Sangkarrang, Kodingareng	putih		pendukung seperti proposal, lokasi, dsb - sesuaikan dengan dokumen perencanaan - Sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah Koefisien : 1 unit Anggaran : 200000000	prasarana perikanan (perahu pokmaswas) Koefisien : 1 unit Anggaran : 0
81	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	buloa, Kota Makassar, Tallo, Buloa	pengadaan alat tangkap jaring lipat (BUH NAGA) kelompok nelayan baji pamai	100 buah	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 100 buah Anggaran : 40000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( alat tangkap jaring lipat) Koefisien : 100 buah Anggaran : 0
82	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	tallo, Kota Makassar, Tallo, Buloa	pengadaan alat tangkap jaring lipat (BUH NAGA) kelompok nelayan rajungan 03	100 buah	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 100 buah Anggaran : 40000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( alat tangkap jaring lipat) Koefisien : 100 buah Anggaran : 0
83	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	tallo, Kota Makassar, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	pengadaan alat tangkap jaring lipat ( BUH NAGA) kelompok nelayan rajungan buloa	100 buah	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 100 buah Anggaran :	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( alat tangkap jaring lipat) Koefisien : 100 buah Anggaran : 0

					40000000	
84	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	tallo, Kota Makassar, Tallo, Tallo, Seluruh Kelurahan/Desa	pengadaan alat tangkap jaring lipat (BUH NAGA) kelompok nelayan biring bangkoa	100 buah	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 100 buah Anggaran : 40000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( alat tangkap jaring lipat) Koefisien : 100 buah Anggaran : 0
85	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	buloa, Kota Makassar, Tallo, Buloa	pengadaan alat tangkap ikan teri (pere-pere) kelompok nelayan ikan sunu	10 unit	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 10 unit Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( alat tangkap ikan teri (pere pere) Koefisien : 10 unit Anggaran : 0
86	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	pulau lae-lae, Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Barrang Caddi	pengadaan alat tangkap kepiting , KUB SINAR	2000 buah	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 2000 buah Anggaran : 700000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( alat tangkap kepiting) Koefisien : 2000 buah Anggaran : 0
87	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	maros, Kab. Maros, Bontoa, Pajukukang	pengadaan alat tangkap bubu lipat , KUB BINA BAHARI	2000 buah	Rekomendasi : - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( alat tangkap bubu lipat) Koefisien : 2000 buah Anggaran : 0

					bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 2000 buah Anggaran : 700000000	
88	Peningkatan Kawasan Konversi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pulau Barrang Caddi, Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Barrang Caddi	Dalam peningkatan kawasan konservasi wilayah laut, ada hal yang penting yang harus dilakukan dengan cara membuat ikan itu tetap tinggal di perairan laut Sulawesi selatan. dengan membuat tempat tinggal ikan berupa, apartemen ikan.	1 paket	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok pengelola Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan tempat tinggal ikan berupa apartemen ikan dalam peningkatan kawasan konservasi wilayah laut Koefisien : 1 paket Anggaran : 0
89	Peningkatan Kawasan Konversi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pulau Barrang Lompo, Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Barrang Lompo	Dalam peningkatan kawasan konservasi wilayah laut, ada hal yang penting yang harus dilakukan dengan cara membuat ikan itu tetap tinggal di perairan laut Sulawesi selatan. dengan membuat tempat tinggal ikan berupa, apartemen ikan.	1 paket	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok pengelola Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan tempat tinggal ikan berupa apartemen ikan Dalam peningkatan kawasan konservasi wilayah laut Koefisien : 1 paket Anggaran : 0
90	Peningkatan Kawasan Konversi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pulau Lae Lae, Kota Makassar, Ujung Pandang, Lae-Lae	Dalam peningkatan kawasan konservasi wilayah laut, ada hal yang penting yang harus dilakukan dengan cara membuat ikan itu tetap tinggal di perairan laut Sulawesi selatan. dengan membuat tempat tinggal ikan berupa, apartemen ikan.	1 paket	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok pengelola Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan tempat tinggal ikan berupa apartemen ikan Dalam peningkatan kawasan konservasi wilayah laut Koefisien : 1 paket Anggaran : 0
91	Peningkatan Kawasan Konversi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Barrang Lompo, Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Barrang Lompo	Dalam peningkatan kawasan konservasi wilayah laut, ada hal yang penting yang harus dilakukan dengan cara membuat ikan itu tetap tinggal di perairan laut Sulawesi selatan. dengan membuat teknik perbanyak koloni karang. yaitu transplantasi	1 paket	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok pengelola Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan transplantasi karang Dalam peningkatan kawasan konservasi wilayah laut, Koefisien : 1 paket Anggaran : 0

			karang.			
92	Peningkatan Kawasan Konversi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pulau Lae-Lae, Kota Makassar, Ujung Pandang, Lae-Lae	Dalam peningkatan kawasan konservasi wilayah laut, ada hal yang penting yang harus dilakukan dengan cara membuat ikan itu tetap tinggal di perairan laut Sulawesi selatan. dengan membuat teknik perbanyak koloni karang. yaitu transplantasi karang.	1 paket	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok pengelola Koefisien : 1 paket Anggaran : 185000000	Rekomendasi : Membutuhkan transplantasi karang dalam peningkatan kawasan konservasi wilayah laut Koefisien : 1 paket Anggaran : 0
93	Pengembangan Budidaya Perikanan	desa kajuara, Kab. Bone, Awangpone, Kajuara	Pengadaan Tali Agar	10 kelompok	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 10 kelompok Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan pengembangan budidaya perikanan ( pengadaan tali agar) Koefisien : 10 kelompok Anggaran : 0
94	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	lonrae, Kab. Bone, Tanete Riattang Timur, Lonrae	Pengadaan Rompong	1 Kelompok	Rekomendasi : - Lengkapi dokumen pendukung seperti proposal, lokasi, dsb - sesuaikan dengan dokumen perencanaan - Sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah Koefisien : 1 unit Anggaran : 35000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan (pengadaan rompong) Koefisien : 1 unit Anggaran : 0
95	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	., Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	Pengadaan Mesin Kapal Nelayan	10 Paket	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan (mesin kapal nelayan) Koefisien : 10 Paket Anggaran : 0

					tahun terakhir - 24 PK Koefisien : 10 Paket Anggaran : 500000000	
96	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	.. Kab. Soppeng, Mariorawa, Kaca	Pengadaan Mesin Kapal Nelayan	10 Paket	Rekomendasi : - Lengkapi dokumen pendukung seperti proposal, lokasi, dsb - sesuaikan dengan dokumen perencanaan - Sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah Koefisien : 1 Paket Anggaran : 500000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan (mesin kapal nelayan) Koefisien : 10 Paket Anggaran : 0
97	Peningkatan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kodingareng Keke, Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Kodingareng	Dalam peningkatan kawasan konservasi wilayah laut, ada hal yang penting yang harus dilakukan dengan cara membuat ikan itu tetap tinggal di perairan laut sulawesi selatan sekaligus menambah destinasi wisata bawah laut. dengan Artificial reef.	1 paket	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok pengelola Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan tempat tinggal ikan dengan Artificial reef. Dalam peningkatan kawasan konservasi wilayah laut Koefisien : 1 paket Anggaran : 0
98	Peningkatan Kawasan Konversi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	samalona, Kota Makassar, Ujung Pandang, Ujung Pandang, Seluruh Kelurahan/Desa	Dalam peningkatan kawasan konservasi wilayah laut, ada hal yang penting yang harus dilakukan dengan cara membuat ikan itu tetap tinggal di perairan laut sulawesi selatan sekaligus menambah destinasi wisata bawah laut. dengan Artificial reef.	1 paket	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok pengelola Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan tempat tinggal ikan dengan Artificial reef. Dalam peningkatan kawasan konservasi wilayah laut Koefisien : 1 paket Anggaran : 0
99	Peningkatan Kawasan Konversi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bulogading, Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	Dalam peningkatan kawasan konservasi wilayah laut, ada hal yang penting yang harus dilakukan dengan diberikan sosialisasi tentang konservasi pengelolaan pesisir dan pulau kecil.	1 paket	Rekomendasi : Melengkapi TOR/KAK kegiatan Koefisien : 1 Kali Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Membutuhkan kegiatan sosialisasi tentang konservasi pengelolaan pesisir dan pulau kecil. Koefisien : 1 Kali Anggaran : 0
100	Peningkatan Sarana dan	UPTD PPI Paotere, Kota Makassar,	Rehabilitasi PPI Paotere	1 paket	Rekomendasi : - dibutuhkan titik	Rekomendasi : Membutuhkan

	Prasarana Perikanan	Ujung Tanah, Gusung			koordinat/lokasi - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	sarana dan prasarana perikanan (Rehabilitasi PPI Paotere) Koefisien : 1 paket Anggaran : 0
101	Peningkatan Kawasan Konversi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pulau Khayangan, Kota Makassar, Ujung Pandang, Lae-Lae	Sosialisasi IUU fishing, bagi nelayan dan masyarakat pulau.	1 paket	Rekomendasi : Melengkapi TOR/KAK Koefisien : 1 Kali Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Membutuhkan kegiatan Sosialisasi IUU fishing, bagi nelayan dan masyarakat pulau. Koefisien : 1 Kali Anggaran : 0
102	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	pulau Kodingareng, Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Kodingareng	pembangunan pos pengawasan pokok masyarakat, bagi masyarakat pulau	1 paket	Rekomendasi : - Dibutuhkan titik koordinat/lokasi - Lengkapi proposal - Sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - Memiliki kelompok pengelola yang ditetapkan dalam SK Gub Koefisien : 1 unit Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Membutuhkan pembangunan pos pengawasan pokok masyarakat, bagi masyarakat pulau Koefisien : 1 unit Anggaran : 0
103	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Pulau barrang lombo, Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Barrang Lombo	pembangunan pos pengawasan pokok masyarakat, bagi masyarakat pulau	1 paket	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok pengelola ditetapkan dalam SK Gub Koefisien : 1 unit Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Membutuhkan pembangunan pos pengawasan pokok masyarakat, bagi masyarakat pulau Koefisien : 1 unit Anggaran : 0
104	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Kodingareng, Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Kodingareng	bantuan perahu untuk kelompok masyarakat pengawas	1 1	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok pengelola ditetapkan dalam SK Gub Koefisien : 1 Unit Anggaran	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( perahu) Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0

					: 150000000	
105	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Barrang lombo, Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Barrang Lompo	bantuan perahu untuk kelompok masyarakat pengawas	1 1	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok pengelola ditetapkan dalam SK Gub Koefisien : 1 unit Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( perahu) Koefisien : 1 unit Anggaran : 0
106	Peningkatan Kawasan Konversi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Jeneponto, Kab. Jeneponto, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Bantuan Bibit dan Sarana Rumput Laut	1 1 Paket	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan bibit dan sarana rumput laut Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0
107	Peningkatan Pengawasan Usaha Kelautan dan Perikanan	Kab. bantaeng, Kab. Bantaeng, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Bantuan Bibit dan Sarana Rumput Laut	1 1 Paket	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan bibit dan sarana rumput lau Koefisien : 1 paket Anggaran : 0
108	Peningkatan Kawasan Konversi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Selayar, Kab. Kepulauan Selayar, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Bantuan Bibit dan Sarana Rumput Laut	1 1 Paket	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum	Rekomendasi : Membutuhkan bibit dan sarana rumput lau Koefisien : 1 paket Anggaran : 0

					mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	
109	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	kabupaten luwu, Kab. Luwu, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	pengadaan mangrove di kabupaten luwu	1 kegiatan	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - surat keterangan dukungan dari pemda setempat - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 1 batang Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membuuthkan sarana dan prasarana perikanan ( mangrove) Koefisien : 1 batang Anggaran : 0
110	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	MAROS BARU, Kab. Maros, Maros Baru, Bori Masunggu	PENGADAAN KAPAL	1 UNIT	Rekomendasi : - Lengkapi dokumen pendukung seperti proposal, lokasi, dsb - sesuaikan dengan dokumen perencanaan - Sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah Koefisien : 1 UNIT Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ((pengadaan kapal) Koefisien : 1 UNIT Anggaran : 0
111	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	KABUPATEN MAROS, Kab. Maros, Bontoa, Pajukukang	PENGADAAN KAPAL	1 UNIT	Rekomendasi : - Lengkapi dokumen pendukung seperti proposal, lokasi, dsb - sesuaikan dengan dokumen perencanaan - Sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah Koefisien : 1 UNIT Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ((pengadaan kapal) Koefisien : 1 UNIT Anggaran : 0
112	Peningkatan Pengawasan Usaha Kelautan dan Perikanan	KABUPATEN MAROS, Kab. Maros, Bontoa, Pajukukang	BANTUAN ALAT TANGKAP IKAN	1 UNIT	Rekomendasi : - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah - memiliki kelompok - belum mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan pengawasan usaha kelautan dan perikanan ( alat tangkap ikan) Koefisien : 1 paket Anggaran : 0
113	Pengembangan	pasilambena, Kab.	Pelatihan	1 Paket	Rekomendasi :	Rekomendasi :

	Budidaya Perikanan	Kepulauan Selayar, Pasilambena, Pasilambena, Seluruh Kelurahan/Desa	Penggunaan Alat Tangkap Modern		sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 1 Angkatan Anggaran : 100000000	Membutuhkan kegiatan Pelatihan Penggunaan Alat Tangkap Modern Koefisien : 1 Angkatan Anggaran : 0
114	Peningkatan Kawasan Konversi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Desa Ampekal, Kab. Maros, Bontoa, Ampikale	PENANAMAN MANGROVE	1 KEGIATAN	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - lengkapi proposal - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 1 batang Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan penanaman mangrove Koefisien : 1 batang Anggaran : 0
115	Peningkatan Pengawasan Usaha Kelautan dan Perikanan	Pantai labombo, Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe	Pengadaan Bibit Mangrove	20.000 Batang	Rekomendasi : - dibutuhkan titik koordinat/lokasi - surat keterangan dukungan dari pemda setempat - sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Koefisien : 20000 Batang Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Membutuhkan peng Pengawasan Usaha Kelautan dan Perikanan ( bibit mangrove) Koefisien : 20 Batang Anggaran : 0
116	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Bone Pute, Kab. Luwu, Larompong Selatan, Bone Pute	Pengadaan bagang tangkap	1 Unit	Rekomendasi : - Lengkapi dokumen pendukung seperti proposal, lokasi, dsb - sesuaikan dengan dokumen perencanaan - Sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah Koefisien : 1 Unit Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( bagang tangkap) Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0
117	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Bawalipu, Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu	Pengadaan Bagang Rambo (Kelompok Nelayan Bahari Indah)	1 UNIT	Rekomendasi : - Lengkapi dokumen pendukung seperti proposal, lokasi, dsb - sesuaikan dengan dokumen perencanaan - Sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah Koefisien : 1 UNIT Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Membutuhkan sarana dan prasarana perikanan ( bagang rambo) Koefisien : 1 UNIT Anggaran : 0

Usulan yang telah disampaikan pada Forum OPD untuk kabupaten/kota sebanyak 74 usulan dan Pokok-Pokok Pikiran sebanyak 139 usulan. Usulan ini akan menjadi rancangan awal Rencana Kerja tahun 2022 namun usulan tersebut masih perlu dilengkapi data dukung.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah**

Guna mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan maka telah ditetapkan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat menunjang peningkatan kualitas profesionalisme aparatur pemerintah dalam tugas, pemberdayaan dan pengaturan. Adapun identifikasi kebijakan nasional Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

**Tabel. 3.1.**  
**Identifikasi Kebijakan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan**

<b>No</b>	<b>Kebijakan Nasional</b>	<b>Sumber</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan	DAK	
2.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah Pesisir	DAK	
3.	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Perbenihan Air Payau dan Tawar	DAK	
4.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP	DAK	

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022 pada RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada akhir periode sebelumnya diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global. Pada tahun 2021 juga dilakukan review RPJMD sesuai OPD baru guna melakukan penyesuaian-penyempaan dalam merespons perubahan lingkungan strategis yang dianggap signifikan pengaruhnya.

Berdasarkan tema ini, maka ditetapkan Arah Kebijakan Pembangunan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sbb:

- Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui Hilirisasi Perikanan dan peningkatan Sarana Prasarana dari Hulu ke Hilir dalam rangka penanganan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat pesisir pasca pandemik COVID-19;
- Pengembangan Inovasi Teknologi produk hasil perikanan sehingga dapat berkompetisi dan berdaya saing;

- Pengembangan hilirisasi produk kelautan dan perikanan yang inklusif dan berkarakter;
- Pengelolaan Sumberdaya Perikanan yang berkelanjutan.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Perencanaan Strategis Tahun 2018-2023 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang hendak dicapai untuk tahun 2022 yaitu :

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Pendek Pelayanan**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan tahun 2022**

NO	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2021	PELAKSANA KINERJA
-1	-2	-3	-4	-5
1	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi OPD	75,45	
1.1	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,21	Kepala Dinas
		Persentase capaian kinerja Program Perangkat Daerah (%)	98,5	
		Persentase Nilai Temuan Material LHP yang ditindaklanjuti (%)	100	
a.	Program Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah (%)	100	Sekretaris, Eselon III UPT dan CDK
		Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan Sangat baik (%)	100.00	
2	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk komoditas unggulan kelautan dan perikanan	Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP (%)	9.52	
		Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan (%)	10,9	
2.1	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	5.1	Kepala Dinas
		Produksi Perikanan (ton)	4.546.138,0	

<b>NO</b>	<b>TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET KINERJA PADA TAHUN 2021</b>	<b>PELAKSANA KINERJA</b>
<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>
a.	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap (Rp.M)	9.029,52	Kepala Bidang Perikanan Tangkap (Eselon III)
		Produksi perikanan tangkap (ton)	404.932,2	
		Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional (%)	68,42	Kepala Bidang Perikanan Tangkap , Kepala UPT Pelabuhan Wilayah I dan II (Eselon III)
b.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai Hilirisasi produksi perikanan budidaya (Rp.M)	15.198,47	Kepala Bidang Perikanan Budidaya (Eselon III)
		Produksi perikanan budidaya (ton)	4.093.705,8	
		Persentase ketersediaan benur berkualitas (%)	100	Kepala UPT BPAPL (Eselon III)
c.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Kecil	Produksi garam rakyat (ton)	47.500	Kepala Bidang Penataan Ruang Laut dan P3K (eselon III)
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan (%)	74,08	Kepala Bidang Penataan Ruang Laut dan P3K dan Kepala CDK (eselon III)
2.2	<b>Sasaran</b> : Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	62.7	<b>Kepala Dinas</b>
a.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai hilirisasi produk olahan ikan konsumsi dan non konsumsi (Rp. M)	304.96	Kepala Bidang Perikanan Budidaya, dan Kepala UPT BPMPP (Eselon III)
		Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi (ton)	5.436,2	
		Persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan (%)	80	
2.3	<b>Sasaran</b> : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Nelayan	102.78	Kepala Dinas
a.	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	27,07	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	26.79	

NO	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2021	PELAKSANA KINERJA
-1	-2	-3	-4	-5
3	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	Potensi penurunan emisi GRK (juta ton CO2) dari sektor perikanan	0.69	
3.1	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (%)	1.03	Kepala Dinas
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	1.05	
		Prosentase Penurunan tindakan IUU Fishing (%)	38.58	
a.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan PPK	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)	26,32%	Kepala Bldang Penataan Ruang Laut Pesisir dan P3K dan Kepala CDK (Eselon III)
b.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)	67,30	Kepala Bldang Pengawasan SDKP dan Kepala CDK (Eselon III)

**Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan** sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel . 3.3**

**Hubungan Tujuan dan Sasaran RKPD dengan RENJA Dinas Tahun 2022**

No	RKPD		Renja	
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	1.1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	1. Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
2	Mengoptimalkan pengelolaan Sumberdaya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup	2.1.Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam	2.Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	2.1. Meningkatkan produksi perikanan dengan menambah jumlah faktorproduksi dan produktivitas produksi 2.2. Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan 2.3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan
		2.2.Terpeliharanya	2.Meningkatkan kelestariandan	2.1 Meningkatnya kelestariandan

		kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan
--	--	---	---	---

Sedangkan Target Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan selaras dengan sasaran pembangunan jangka pendek tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.4

**Tabel 3.4**  
**Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Dinas Kelautan Dan Perikanan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Indikator	Target Capaian Tahun 2022	Formulasi	Pengukuran Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>SS1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah</b>				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,21	Lembar Hasil Evaluasi	Permenpan
2	Persentase capaian kinerja Program Perangkat Daerah (%)	98,5	Lembar Hasil Evaluasi	Permenpan
3	Persentase Nilai Temuan Material LHP yang ditindaklanjuti (%)	100	Lembar Hasil Evaluasi	Permenpan
<b>SS2.1 Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi</b>				
1	Produksi Perikanan (ton)	4.546.138,0	Produksi Perikanan = Tpt + Tpb (Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya)	BPS
3	Kontribusi PDRB Perikanan (%)	5,1	(PDRB perikanan /PDRB Daerah)x100%	BPS
<b>SS2.2 Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan</b>				
1	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	62,7	AKI = A + B + C dimana A = Konsumsi di Rumah Tangga B = Konsumsi Luar Rumah Tangga C = Konsumsi Tidak Tercatat	BPS
<b>SS2.3 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan</b>				
1	NilaiTukar Nelayan (NTN)	102,78	Indeks yang diterima nelayan x 100% Indeks yang dibayar nelayan	BPS
<b>SS3.1 Meningkat nya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan</b>				
1	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	1.07	$\frac{\text{Kawasan Lindung Perairan}}{\text{Total Luas Perairan Teritorial}} \times 100\%$	DKP (data olahan)
2	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	38.58	$\frac{\text{Jumlah Tangkapan Ikan}}{\text{Total Luas Perairan Teritorial}} \times 100$	DKP(data olahan)
3	Prosentase Penurunan Tindakan IUU Fishing (%)	26,32	$\frac{\text{Jumlah kasus yang ditangani tahun (n)} - \text{Jumlah kasus yang ditangani tahun (n-1)}}{\text{Jumlah kasus yang ditangani tahun (n)}} \times 100$	DKP(data olahan)

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan, maka ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Dalam rangka Hilirisasi Perikanan tetap diarahkan dukungan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Budidaya, Pengembangan kluster Produksi, Pengembangan Pelabuhan Perikanan, Pengolahan dan Perluasan Pasar Produk Perikanan, Pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Perbaikan mutu dan daya saing produk kelautan dan perikanan, Pembinaan para pelaku usaha kelautan dan perikanan serta Kemitraan pelaku dengan sumber inovasi dalam rangka peningkatan produksi
2. Penataan Sistem dan Manajemen pada Pengembangan Komoditas dan produk unggulan dari Hulu ke Hilir dengan berorientasi pasar, Pengembangan konektivitas dan infrastruktur, Pengembangan Usaha dan Investasi, Pengendalian Mutu dan Keamanan Produk, Pengembangan IPTEK dan SDM, Pemberdayaan masyarakat, Fasilitasi Pengembangan Wirausaha dan Fokus pada Pengarusutamaan Gender.
3. Penataan dan Peningkatan Manajemen dalam Pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan.
4. Pembangunan kemaritiman diarahkan Penatakelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengembangan infrastruktur.
5. Kesepakatan dalam pencapaian target indikator terutama pada peningkatan Produksi Perikanan, Garam, Produksi Olahan dan penurunan tindakan IUU Fishing dalam rangka mendukung persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan tahun 2022 telah sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2023 dan telah dilakukan pemetaan numenklatur program dan kegiatan sesuai Permendagri No. 90 tahun 2019 namun berdasarkan verifikasi rancangan Renja Tahun 2022 terhadap kesesuaian dengan RKPD maka pemetaan sebagai sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemetaan dengan numenklatur program Permendagri 90 tahun 2019 menjadi 6 program dengan penjelasan sebagai berikut :

**Tujuan : Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk komoditas unggulan kelautan dan perikanan**

**Sasaran :**

- 1. Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi**
- 2. Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan**
- 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan**

Didukung oleh program :

**Program Prioritas :**

**1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

**Indikator Program :**

- a. Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2022 sebesar Rp. 8.852,48 M**
- b. Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2022 sebesar 396.992,3 ton**
- c. Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional tahun 2022 sebesar 57,89%**
- d. Cakupan Bina Kelompok Nelayan pada tahun 2022 sebesar 23,89%**
- e. Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan pada tahun 2022 sebesar 25,61%**

Program ini meliputi kegiatan :

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil  
Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
  - b. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
  - c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- b. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  
Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
  - b. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

- c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT  
 Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
  - a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
  - b. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
  - c. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- d. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil  
 Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
  - a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil
  - b. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil
- e. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  
 Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
  - a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
  - b. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
- f. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan perikanan Provinsi  
 Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
  - a. Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
  - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
  - c. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
- g. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal  
 Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- b. Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- h. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  
 Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
  - a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
  - b. Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
- i. Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT  
 Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
  - a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
  - b. Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- j. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  
 Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
  - a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GTPenerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
  - b. Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT

Berdasarkan aspek kajian pengembangan dan pembangunan perikanan tangkap yang menentukan keberhasilan dan tingkat produktifitas unit usaha. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil berbasis Teknologi penangkapan ikan (fishing technology) yang diarahkan pada peningkatan produktifitas

penangkapan sebagai target pencapaian dengan indikator kinerja diarahkan pada efektifitas dan efisiensi upaya penangkapan ikan yang dilakukan meliputi:

- a) Penerapan teknologi penangkapan ikan berbasis potensi ruang dengan menetapkan komoditas unggulan sebagai target tangkapan,
- b) Pemanfaatan teknologi alat bantu penangkapan ikan seperti, penggunaan Global Position Service (GPS), cahaya, umpan, dan resonansi suara
- c) Penanganan dan pengendalian teknologi penangkapan ikan yang overfishing dan tidak ramah lingkungan (destructive fishing) melalui pengelolaan jumlah dan jenis alat tangkap, pengaturan ukuran mata jaring untuk selektifitas target tangkapan, dan pembatasan daerah operasi penangkapan ikan pada zona terlarang.
- d) Pengelolaan dan pengembangan Sumberdaya Ikan
- e) Pelayanan rekomendasi usaha Perikanan tangkap dalam rangka perijinan dan kemudahan akses nelayan dalam melakukan usaha Perikanan tangkap di luar wilayah penangkapan ikan provinsi Sulawesi Selatan.
- f) Penguatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama yang berbasis antar pemerintah, institusi, lembaga dan swasta dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
- g) Revitalisasi sarana dan prasarana penangkapan ikan yang lebih modern untuk menjaga kualitas hasil tangkapan dan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca bencana alam dan pandemik global.

Gambaran umum potensi pembangunan perikanan tangkap Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tiga karakteristik wilayah pesisir yang khas/spesifik, yaitu perairan wilayah pesisir Teluk Bone, wilayah pesisir Laut Flores, dan wilayah pesisir Selat Makassar. Ketiga karakteristik wilayah perairan ini seharusnya mampu dioptimalkan pemanfaatannya sebagai potensi yang sangat besar dan luar biasa dalam mengakselerasi pembangunan perikanan tangkap dan mendukung *Marine Culture*.

Kajian ikan target tangkapan (fish target) dan daerah penangkapan ikan (fishing ground) dititikberatkan pada analisis entitas dan potensi ruang yang ditetapkan sebagai daerah penangkapan ikan sebagai wilayah kajian dengan segala potensi sumberdaya ikan yang terkandung didalamnya. Ruang lingkup kajian target tangkapan akan mendeskripsikan produksi dan potensi sumberdaya ikan yang berada pada suatu daerah penangkapan ikan melingkupi komposisi jenis, ukuran ikan, jumlah hasil tangkapan sebagai total produksi dan jumlah stok sumberdaya ikan, ekosistem dan

habitat keberadaan target tangkapan, dan tingkah laku ikan target tangkapan. Pengetahuan dan pemahaman tingkah laku ikan target tangkapan terhadap penguasaan karakteristik daerah penangkapan merupakan acuan dasar dan basis pengembangan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Diperlukan manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan, baik yang bersifat teknis pada teknologi penangkapan ikan maupun yang bersifat manajemen dalam pengelolaan base-line data secara sistematis dan terstruktur dari waktu ke waktu untuk memperbaiki dan mengembangkan kondisi eksisting yang telah dicapai. Selain itu memberdayakan armada plasma yang merupakan kapal/perahu nelayan skala kecil untuk mendukung *marine culture*.

Peluang pengembangan perikanan tangkap dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan melakukan pengelolaan pelabuhan perikanan yang tersebar di 19 kabupaten/kota dengan memfasilitasi pelayanan kepada nelayan baik skala besar maupun skala kecil dengan memperhatikan aspek kualitas mutu dan higienisasi sarana prasarana pelabuhan perikanan.

## **2. Program Perikanan Budidaya :**

### **Indikator Program :**

- a. Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Budidaya tahun 2022 Rp. Rp. 14.474,73 M**
- b. Produksi Perikanan Budidaya tahun 2022 sebesar 3.898.767,4 ton**
- c. Persentase ketersediaan benur berkualitas 100% per tahun**

Program ini diarahkan untuk mendukung keberhasilan pengembangan komoditas unggulan yaitu udang windu dan rumput laut serta komoditas ikan lainnya dimana dibutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan yang diatur dalam UU 23 tahun 2014. Pemerintah provinsi selaku Pembina antar kabupaten/kota akan efektifkan fungsi koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi. Adapun dukungan kegiatannya adalah sebagai berikut :

Program ini meliputi kegiatan :

1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahax Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
  - b. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
  - c. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
2. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing  
 Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
    - a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
    - b. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
  3. Penerbitan Izin kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing  
 Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
    - a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT
    - b. Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT
  4. Penerbitan Tanda daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) DI Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dalam provinsi  
 Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
    - a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
    - b. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  5. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut  
 Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
    - a. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
    - b. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
    - c. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah

- Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- d. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
  - e. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - f. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - g. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
  - h. Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - i. Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Program kegiatan ini adalah kelompok prioritas yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan dimana indikatornya fokus pada nilai hilirisasi produk. Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi dan optimalisasi hilirisasi produk untuk mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu Pengembangan Hilirisasi Komoditas Unggulan yaitu **udang windu** dan **rumput laut** dengan melakukan Diseminasi teknologi dan Inovasi berbasis kawasan sampai tahun 2023. Adapun tujuan program adalah (1) Peningkatan Pendapatan, (2) Penyerapan Tenaga Kerja melalui usaha perikanan budidaya, 3) Pemulihan ekonomi pasca bencana alam dan pandemik global. Adapun produksi komoditas unggulan perikanan budidaya pada tahun awal kondisi tahun 2018 dan 2020 dan rencana tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2021 dilakukan studi kelayakan terkait budidaya laut (*marine culture*) yang ramah lingkungan dan diharapkan dapat diterapkan di beberapa kabupaten/kota pada tahun 2022 dan 2023.

Selain itu Program tersebut diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri strategis perikanan di Sulawesi Selatan dengan prioritas usaha adalah agroindustri dan industri yang memiliki keterkaitan industri/pasar didaerah lain termasuk luar negeri, melalui usaha ini akan memicu laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Selain itu dilakukan pengembangan kampung pembudidaya bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, kampung ini diharapkan dapat memulihkan Ekonomi masyarakat dengan Corporate Farming dengan membangun Kampung-Kampung Perikanan Budidaya Tawar, Payau Dan Laut seperti *Kampung Lobster, Lele, Nila, Kakap, Kerapu, Rumput Laut, dll.*

Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas yang bertumpu pada potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal seperti Rumput Laut, Udang, Bandeng dan komoditas ikan lainnya. Dalam rangka pencapaian target kinerja maka implementasi program, kegiatan dan subkegiatan lebih diarahkan pada:

- a. Diseminasi pengembangan inovasi teknologi budidaya udang windu berbasis Kawasan dan ramah lingkungan dengan kluster pengembangan terbagi atas 3 kluster yaitu 1) Kluster I : Pinrang, Bone, Maros, Takalar, Pangkep, 2) Kluster II : Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Jeneponto, Bulukumba, 3) kluster III : Wajo, Barru, Makassar, Gowa, Sinjai, Selayar, Palopo, Bantaeng.
- b. Pengembangan budidaya rumput laut dengan melakukan pengembangan dari hulu yaitu pengembangan bibit hasil kultur jaringan dan hilir yaitu penanganan pasca panen di 19 kabupaten/kota serta percontohan budidaya laut (*marine culture*) yang ramah lingkungan di kabupaten/kota yang sesuai dengan potensi dan daya dukungnya.
- c. Pengembangan sarana dan prasarana perbenihan untuk produksi benur yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan benur pada program prioritas dan permintaan masyarakat dalam mengembangkan usaha budidaya payau.
- d. Pengembangan budidaya air tawar sesuai kewenangan provinsi dan pemeliharaan sarpras instalasi Balai Benih Ikan Provinsi dalam rangka peningkatan produksi benih komoditas ikan air tawar dan memenuhi kebutuhan benih dalam rangka pemulihan ekonomi.
- e. Revitalisasi sarana dan prasarana perikanan budidaya payau dan air tawar dalam rangka peningkatan produksi dan pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana alam dan pandemik global.
- f. Pengendalian dan pengelolaan Kesehatan lingkungan budidaya payau, tawar dan laut.
- g. Koordinasi lintas sektor dalam mendukung program prioritas daerah.

Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lain perlu diperhatikan berbagai upaya salah satunya yaitu penguatan kelembagaan, akses permodalan, perluasan jejaring, kerjasama antar pemerintah, institusi, lembaga,

swasta dan kemitraan serta mengoptimalkan hilirisasi produk yang dapat memberikan dampak perekonomian daerah.

### **3. Program Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

#### **Indikator Program**

- a. Produksi garam rakyat tahun 2022 sebesar 46.500 ton**
- b. Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan tahun 2022 sebesar 50,17 %%**

Dalam rangka pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diupayakan pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya **pesisir dan pulau-pulau kecil** yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program ini diarahkan pada pengembangan pengembangan dan pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu program yang mendukung penanganan kemiskinan dan kesejahteraan nelayan. Perubahan sosial ekonomi di desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil atau desa nelayan telah memperjelas garis stratifikasi sosial masyarakatnya. Nelayan kecil merupakan lapisan yang paling banyak jumlahnya dimana mereka hidup dalam taraf kemiskinan dan tekanan-tekanan sosial ekonomi yang berakar pada faktor-faktor kompleks yang saling terkait. Salah satu strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yaitu meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Adapun dukungan kegiatannya adalah sebagai berikut.

#### **1. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- c. Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- d. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pada program, kegiatan dan sub kegiatan ini diarahkan pada pengembangan usaha garam juga menjadi prioritas pada program hilirisasi perikanan dimana input produksi memberikan dampak hasil yang cukup menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi pengembangan berada pada 5 kabupaten yaitu kabupaten Jeneponto, kabupaten Takalar, kabupaten Pangkep, Kabupaten Maros dan kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun optimalisasi pengembangan dengan menyediakan fasilitas prasarana seperti gudang garam mini, penerapan teknologi produksi dan penanganan pasca panen. Dalam rangka mendukung industrialisasi garam dilakukan kerjasama lintas sektor dimana peran yang akan dilakukan yaitu dapat menjamin ketersediaan stok/bahan baku garam untuk industrialisasi dan melakukan inovasi produk garam menjadi produk yang lebih berdaya saing.

#### **4. Program Pengolahan dan Pemasaran Indikator Program :**

- a. Nilai Hilirisasi Produk olahan ikan konsumsi dan non konsumsi tahun 2022 sebesar Rp. 304.96 Milyar**
- b. Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi tahun 2022 sebesar 5.329,0 ton**
- c. Persentase pembinaan mutu produk perikanan tahun 2022 sebesar 60%**

Tahun 2021 – 2023 akan dilakukan upaya untuk mendukung hilirisasi produk perikanan dan melanjutkan kegiatan tahun sebelumnya. Dalam rangka peningkatan konsumsi ikan pada masyarakat untuk menghadapi masa pandemik dan menumbuhkan kembali usaha unit pengolah yang tahun 2020 mengalami masa sulit dalam berusaha akibat pandemik global maka optimalisasi pengembangan yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan fasilitasi bimbingan, pembinaan dan revitalisasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran dalam mendukung bahan baku industri serta melakukan inovasi olahan produk perikanan. Adapun dukungan kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

1. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi  
Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
  - a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- b. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - c. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
  - b. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- b. Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- c. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran diarahkan pada program hilirisasi perikanan dengan melakukan inovasi produk pengolahan agar produk perikanan memiliki nilai tambah produk sehingga memberikan dampak hasil yang cukup menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu program ini mendukung pencapaian indikator SDGs untuk penurunan stunting dan pemulihan ekonomi. Selain itu dalam rangka mendukung industrialisasi, akan dilakukan pemetaan dan pemantauan bahan baku usaha pengolahan, pengujian sampel mutu produk, dan pengembangan informasi manajemen logistik ikan secara digitalisasi.

**Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup**

**Sasaran : Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan**

Didukung oleh program :

**Program Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

**Indikator Program :**

- a. **Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan tahun 2022 sebesar 67,29% (674.229,5 Ha)**
- b. **Cakupan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tahun 2022 sebesar 60 %**

Program pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada upaya pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya agar dapat menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Usaha tersebut sebagai perwujudan bagi Sulawesi Selatan sebagai Entitas Sosial Ekonomi yang berkeadilan. Tujuan yang dapat dicapai adalah untuk meningkatkan daya tarik wilayah terhadap investor termasuk kunjungan wisata dan sekaligus juga dapat memberi iklim yang kondusif bagi Sulawesi Selatan dalam pengembangan kegiatan konservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta mendukung penurunan/emisi karbon.

Pada program pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
- b. Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
- c. Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
- d. Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir

- e. Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut
2. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
- Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
- a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  - b. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
  - c. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  - d. Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Adapun upaya yang dilakukan pada subkegiatan adalah

- a. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.
- b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
- c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan
- d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan inovasi pemanfaatan dan pengelolaan.
- e. Penyusunan kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang
- f. Pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan
- g. Mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses
- h. Ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.

- i. Pengembangan Wisata Bahari dan pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem pesisir dengan integrasi pengembangan lintas sektor serta edukasi kepada masyarakat.
- j. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok masyarakat untuk mendukung kelestarian kawasan konservasi dan melakukan pembinaan kelompok.

### **Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

#### **Indikator Program :**

**Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tahun 2022 sebesar 87,48%**

Pada program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk memelihara dan melindungi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terutama Sumberdaya yang telah mengalami degradasi tingkat produktivitasnya. Upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung program yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dalam memelihara dan melindungi sumberdaya perikanan dan kelautan dengan membentuk system pengawasan berbasis masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan khususnya untuk pengawasan destructive fishing, illegal fishing, pengamanan sumberdaya ikan dan lingkungan, penataan dan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perikanan. Program ini juga diarahkan untuk penguatan kelembagaan organisasi masyarakat lokal sebagai upaya strategis dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dengan meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Program ini memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
  - b. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
  - c. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil
  - d. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
- b. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya
- c. Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Usaha yang dapat dilakukan dalam mendukung kegiatan yaitu :

1. Patroli dalam rangka pengawasan baik di laut, perairan umum dan darat serta koordinasi dan pengawasan terpadu bersama aparat terkait dalam rangka melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran dan penanganan kasus.
2. Kerjasama antar pemerintah pusat, kabupaten/kota maupun provinsi lain dalam rangka pengawasan wilayah laut dan perairan umum.
3. Sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan terhadap larangan penggunaan bahan dan alat tangkap yang dapat merusak sumberdaya perikanan.
4. Intensifikasi pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan bahan terlarang untuk penanganan hasil perikanan
5. Pelatihan kesadaran masyarakat dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan sumberdaya perikanan
6. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok masyarakat Pengawas Perikanan di setiap daerah dan melakukan pembinaan
7. Himbauan dan larangan terhadap pengambilan terumbu karang dan biota - biota tertentu yang dianggap telah hampir punah.
8. Melalui usaha tersebut diatas, maka diharapkan tingkat kerusakan sumberdaya perikanan dan kelautan berkurang dan terjadi peningkatan produktivitas tangkapan ikan.

Untuk kelancaran dan dukungan operasional kegiatan maka terdapat Program Penunjang untuk mendukung Program Utama yaitu :

## **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Indikator Program :

- a. Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah
- b. Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan Sangat baik
- c. Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP

Pada program ini akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

### **1. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***

Adapun sub kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

### **2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***

Adapun sub kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

### **3. *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***

Adapun sub kegiatan :

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

- e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

4. ***Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah***

Adapun sub kegiatan :

- a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- c. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
- d. Pengolahan Data Retribusi Daerah
- e. Penetapan Wajib Retribusi Daerah
- f. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

5. ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***

Adapun sub kegiatan :

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- e. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- f. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- g. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
- h. Pemindahan Tugas ASN
- i. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- j. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- k. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

6. ***Administrasi Umum Perangkat Daerah***

Adapun sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- g. Penyediaan Bahan/Material
- h. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

**7. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***

Adapun sub kegiatannya :

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pengadaan Alat Besar
- d. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- e. Pengadaan Mebel
- f. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- h. Pengadaan Aset Tak Berwujud
- i. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- j. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- k. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**8. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

Adapun sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**9. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

Adapun sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- e. Pemeliharaan Mebel
- f. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- h. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

Untuk pelaksanaan Renja tahun 2022 dukungan melalui Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional diuraikan sebagai berikut :

**Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional:**

1. **Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap**, dengan kegiatan prioritas antara lain : 1)Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI), 2) Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan, 3) Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan, 4) Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil, 5) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap.
2. **Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**, dengan kegiatan prioritas antara lain : 1) Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan, 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan, 3) Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan, 4) Pengembangan Sistem Usaha Pembudi-dayaan Ikan, 5) Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan, 6) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. Perikanan Budidaya.
3. **Program Peningkatan daya saing produk perikanan**, dengan kegiatan prioritas 1) Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan, 2) Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, 3) Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan, 4) Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan, 5) Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan, 6) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Peningkatan Daya Saing.

4. **Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil**, dengan kegiatan prioritas : 1) Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis, 2) Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, 3) Pendayagunaan Pesisir dan Lautan, 4) Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, 5) Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat, 6) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K
5. **Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan** dengan kegiatan prioritas : 1) Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan, 2) Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan, 3) Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas, 4) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantuan Kapal Perikanan, 5) Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan, 6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2SDKP
6. **Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya** dengan kegiatan prioritas : 1) Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KP, 2) Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP, 3) Pengembangan Data Statistik dan Informasi KP.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Rencana Kerja**

Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka pencapaian visi dan misi yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan. Pembangunan wilayah di sektor kelautan dan perikanan pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan pelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat, serta penataan ruang. Arah kebijakan yang ditetapkan disesuaikan dengan fungsi masing-masing. Meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas masyarakat, swasta dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis . Pada tahun 2022 arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah menjadi acuan penentuan pilihan program kegiatan tahunan yang akan dibahas dalam serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang. Lebih lanjut, isi dan substansi dari Rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini mencakup indikasi rencana program dan kegiatan prioritas yang dirinci menurut tugas dan fungsi. Untuk pencapaian sasaran tersebut maka arah akan ditempuh dalam rangka menunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

#### **4.2 Pendanaan Program dan Kegiatan**

Pendanaan Program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Tahun 2022 direncanakan akan melaksanakan 6 program kegiatan sesuai dengan

Permendagri 90 tahun 2019 dengan rencana kerja termuat dalam program kegiatan tabel T-C 33 sesuai lampiran Permendagri 86 Tahun 2017. Berdasarkan penetapan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam bentuk rencana aksi untuk mendukung pencapaian visi dan misi maka indikator sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang hendak dicapai tahun 2022 rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1 (Tabel T-C 33)**  
**Rancangan Akhir RENJA**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan**

**Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.38.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3																	
3										76.988.055.667							113.951.202.693
3										32.237.605.454							38.980.637.326
3																	
3		001	1							722.000.000							898.194.420
3	25	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun				15 Dokumen		112,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			123,882,964
3	25	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi				48 Dokumen		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			62,388,821
3	25	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD yang tersusun dan terkoordinasi				30 Dokumen		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			22,000,000
3	25	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi				30 Dokumen		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27,959,400
3	25	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan DPA- SKPD yang tersusun dan terkoordinasi				30 Dokumen		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			26,192,093
3	25	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah data dan Informasi				2 Laporan		500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			595,169,926
						Jumlah Data Yang Dipublikasikan					6 Jenis			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan terkoordinasi					10 Dokumen						
3	25	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat		Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja				12 Dokumen		15,000,000	Dana			40,601,216

					Daerah		Perangkat Daerah								Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>001</b>	<b>1</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>23,926,184,340</b>				<b>29,452,843,067</b>	
3	25	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah laporan Gaji dan Tunjangan ASN yang terkoordinasi dan tepat waktu				12 Laporan				23,820,184,340				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	29,216,250,000
3	25	1	1	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah laporan Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terverifikasi				4 Laporan				5,000,000				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11,000,000
3	25	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan				12 Laporan				20,000,000				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	65,818,562
3	25	1	1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah laporan akuntansi SKPD yang dilaksanakan dan telah terkoordinasi				12 Laporan				10,000,000				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	53,155,410
3	25	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dilaksanakan dan telah terkoordinasi				1 Laporan				3,000,000				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3,343,725
3	25	1	1	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan dan dikelola				1 Laporan				30,000,000				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	44,619,960
3	25	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun dan telah terkoordinasi				18 Jenis Laporan				35,000,000				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	53,155,410
3	25	1	1	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah laporan analisis prognosis anggaran yang telah disusun				1 Laporan				3,000,000				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5,500,000
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>001</b>	<b>1</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>										<b>1,015,000,000</b>					<b>1,030,000,000</b>
3	25	1	1	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik SKPD				1 Laporan				1,000,000				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5,500,000
3	25	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah pengamanan aset barang milik daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Unit				997,000,000				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	997,000,000
3	25	1	1	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan				5,000,000				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5,500,000

3	25	1	1	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,500,000	
3	25	1	1	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan		1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,500,000	
3	25	1	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	umlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,500,000	
3	25	1	1	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan		1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,500,000	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>001</b>	<b>1</b>		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>							<b>10,000,000</b>						<b>21,000,000</b>
3	25	1	1	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan perencanaan pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,500,000	
3	25	1	1	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah laporan perencanaan pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,500,000	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>001</b>	<b>1.1</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>374,000,000</b>						<b>588,624,287</b>
3	25	1	1.1	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai				2 unit		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				52,500,000	
3	25	1	1.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya				209 Pasang		144,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,739,999	
3	25	1	1.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan Administrasi kepegawaian yang diolah				12 Laporan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				43,879,041	
3	25	1	1.1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data sistem informasi kepegawaian yang telah dikoordinasi				12 laporan		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				31,020,297	
3	25	1	1.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Laporan		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				69,634,950	
3	25	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang telah diikuti				3 Laporan		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				173,250,000	



									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
									Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
									Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
3	25	1	1.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah arsip dinamis pada SKPD yang ditatausahakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Jenis		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5,250,000
3	25	1	1.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikelola SKPD		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Jenis		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					31,500,000
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>001</b>	<b>1.1</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>100,000,000</b>						<b>100,000,000</b>
3	25	1	1.1	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang telah diadakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0
3	25	1	1.1	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah aset tak berwujud yang telah diadakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Jenis		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100,000,000
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>001</b>	<b>1.1</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>3,584,921,114</b>						<b>3,957,392,032</b>

3	25	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah jasa Surat menyurat yang telah tersedia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,500,000
3	25	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang telah tersedia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		971,779,082	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,323,000,000
3	25	1	1.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang telah tersedia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Jenis		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,750,000
3	25	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa pelayanan umum kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		147 Orang		2,608,142,032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,608,142,032
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>001</b>	<b>1.1</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>1,035,000,000</b>					<b>1,008,238,750</b>	
3	25	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan bebas pajak				16 unit		350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				28,113,750
3	25	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang terpelihara dan bebas pajak				8 Unit		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55,125,000
3	25	1	1.1	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah aset tak berwujud yang terpelihara				1 unit		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
3	25	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung yang terpelihara/direhabilitasi				5 Unit		400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				600,000,000
3	25	1	1.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara/direhabilitasi				20 unit		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				210,000,000
3	25	1	1.1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara/direhabilitasi		Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bulukumba, Semua		20 Unit		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				105,000,000







						berkelanjutan (Prioritas)		mill dan dokumen teknis pemanfaatannya								berkelanjutan (Prioritas)		
3	25	2	1	4	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Prioritas)	Jumlah rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mill dan dokumen teknis pemanfaatannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,30 %	4 Rekomendasi	60%	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Prioritas)	67,30 %	12,600,000
3	25	2	1	5	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Prioritas)	Jumlah dokumen Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mill dan dokumen teknis pemanfaatannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,30 %	1 Dokumen	60%	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Prioritas)	67,30 %	52,500,000
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>002</b>	<b>1</b>		<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>								<b>750,000,000</b>					<b>1,434,250,000</b>
3	25	2	1	1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Produksi garam rakyat (Prioritas)	Jumlah Sarana Inovasi Teknologi Usaha Masyarakat Pesisir	Tersedianya sarana prasarana di wilayah pesisir dan PPK yang dimanfaatkan pelaku usaha	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,708 Ton	10 Unit	60%	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi garam rakyat (Prioritas)	98,708 Ton	166,375,000
3	25	2	1	2	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Produksi garam rakyat (Prioritas)	Jumlah sarana dan prasarana usaha garam	Tersedianya sarana prasarana di wilayah pesisir dan PPK yang dimanfaatkan pelaku usaha	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,708 Ton	10 Unit	60%	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Produksi garam rakyat (Prioritas)	98,708 Ton	1,102,500,000



								Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
								Kab. Jenepono, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
								Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
								Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
								Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
								Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
								Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
								Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
								Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
								Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
								Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
								Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3	25	3	1	3	Penjaminan Ketersediaan		Jumlah alat bantu tangkap	Kab. Bantaeng,	100 Unit		2,550,000,000	Dana					3,150,000,000













								Semua Kelurahan								
								Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
								Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
								Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
								Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
								Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
								Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
								Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
								Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
								Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
								Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
								Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
3	25	4	1.1	3	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang	Jumlah Prasarana Budidaya yang terbangun	Kab. Barru, Semua Kecamatan,		2 Unit		1,700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana				6,660,554,410

					Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Perbenihan Yang di operasionalkan		Semua Kelurahan		2 Unit		Alokasi Umum					
3	25	4	1.1	4	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah induk unggul untuk menghasilkan benih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		750 ekor		150,000,000				226,012,500	
3	25	4	1.1	5	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah diseminasi inovasi teknologi budidaya udang windu berbasis kawasan (WINDU BANGKIT		Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		130 Unit			4,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,900,000,000
							Jumlah Sarana dan Prasarana Perbenihan yang di operasionalkan		Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Unit							
									Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
									Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
									Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
									Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
									Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan,																	



								Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
								Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
								Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
								Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
								Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
								Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
								Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
								Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
								Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
								Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
								Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3	25	5	1	2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan	Jumlah peserta sosialisasi dan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi	Tersedianya sarana prasarana pengawasan sumberdaya KP yang	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Luwu,	88,73 %	100 Unit	60%	7,300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan	88,73 %	9,747,020,342
							Jumlah sarana dan prasarana				33 Unit						

						peraturan perundangan yang berlaku (Prioritas)	pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	dapat dimanfaatkan dan Unit Usaha yang mendapatkan pengawasan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		peraturan perundangan yang berlaku (Prioritas)		
							Jumlah usaha perikanan tangkap yang mendapatkan Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan		Kab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Unit							
									Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
									Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
									Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
3	25	5	1	3	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Prioritas)	Jumlah usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil yang mendapatkan pengawasan	Tersedianya sarana prasarana pengawasan sumberdaya KP yang dapat dimanfaatkan dan Unit Usaha yang mendapatkan pengawasan	Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,73 %	1 Unit	60%	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Prioritas)	88,73 %	52,500,000
3	25	5	1	4	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Prioritas)	Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan	Tersedianya sarana prasarana pengawasan sumberdaya KP yang dapat dimanfaatkan dan Unit Usaha yang mendapatkan pengawasan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,73 %	14 Kelompok	60%	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Prioritas)	88,73 %	70,350,000
3	25	005	1		<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>							<b>95,000,000</b>				<b>170,800,000</b>	
3	25	5	1	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap	Jumlah sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Tersedianya Sarana Prasarana Pengawasan Di Perairan	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,73 %	2 Unit	60%	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap	88,73 %	60,250,000

					Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Prioritas)	Jumlah usaha perikanan tangkap pada Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang mendapatkan pengawasan	Umum Daratan Lintas Kabupaten Yang Termanfaatkan	Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit					ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Prioritas)		
3	25	5	1	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Prioritas)	Jumlah usaha pembudidayaan ikan di perairan umum yang mendapatkan pengawasan	Tersedianya Sarana Prasarana Pengawasan Di Perairan Umum Daratan Lintas Kabupaten Yang Termanfaatkan	Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tana Toraja, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Toraja	88,73 %	1 Unit	60%	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Prioritas)	88,73 %	50,250,000



					Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Kecamatan, Semua Kelurahan						Alokasi Umum			
3	25	6	1	3	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27,500,000
TOTAL												76.988.055.667			113.951.202.693			

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Catatan Penting**

Berdasarkan hasil Musrenbang Provinsi terdapat beberapa usulan bantuan hibah masyarakat yang diakomodir dan diharapkan kabupaten/kota dan aspirasi pokok-pokok pikiran dapat memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan hibah yang berlaku. Selain itu kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian adalah kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat karena pada tahun 2022 diarahkan pada program prioritas pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi pada masyarakat pesisir pasca pandemik COVID-19, dan perbaikan/ restorasi kawasan mangrove dalam rangka penataan dan perbaikan lingkungan pesisir. Dalam pelaksanaannya ke depan maka perlu kesiapan dan dukungan anggaran serta secara teknis agar kabupaten/kota dapat membantu masyarakatnya untuk memenuhi persyaratan proposal dan integritas dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan tersebut. Namun seandainya anggaran yang ada tidak tersedia maka alternative yang ditempuh adalah dengan memilih kegiatan yang lebih proritas sesuai kebijakan pemerintah daerah.

#### **5.2. Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2022. Renja ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2022. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran RKA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk optimalisasi dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dicapai. Perencanaan tidak berhenti pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan Rencana dan Tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu **prosedur standar** pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk membuktikan (*Proving*) kinerja dan untuk memperbaiki (*Improving*) kinerja. Adapun kendala yang masih dihadapi adalah :

**a. Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan**

Pemerintah belum sepenuhnya mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Pemerintah sebagai aktor kunci, belum sepenuhnya berperan dalam menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha;

**b. Penerapan *e-government* belum berjalan efektif dan efisien**

Penerapan *e-government* belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi. Inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, masih sering terjadi;

**c. Manajemen SDM Aparatur masih belum berjalan secara efektif**

Masih banyak terjadi penempatan ASN dalam jabatan yang tidak sesuai kompetensi, dan terjadi gap kompetensi pegawai yang ada dengan persyaratan kompetensi jabatan yang diduduki, sehingga kinerja/produktivitas belum optimal. Integritas PNS yang dinilai masih rendah, serta sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja. Manajemen kinerja pegawai belum berjalan sehingga berdampak pada belum dapat dilaksanakannya identifikasi kelompok pegawai yang potensial (*talent pool*) untuk kaderisasi

kepemimpinan. Sistem pembinaan karier pegawai belum dapat memberikan kejelasan karier pegawai yang memiliki prestasi baik. Dengan belum berjalannya manajemen kinerja juga berdampak pada perencanaan pelatihan kepada pegawai yang berorientasi pada pengembangan kompetensi belum dapat direalisasikan hampir di seluruh jajaran instansi pemerintah. Perbaikan gaji (remunerasi) masih terkendala dengan sistem pembayaran pensiun yang masih bergantung penuh dengan APBN.

**d. Inefisiensi penggunaan anggaran**

Penggunaan masih dihadapkan pada beberapa kendala antara lain: 1) belum terdapat standarisasi sarana dan prasarana aparatur yang komprehensif; sistem dan budaya yang mendorong efisiensi belum terbangun, dan 2) besarnya biaya operasional yang tidak sebanding dengan kualitas pelayanan atau dampak pembangunan yang dihasilkan;

**e. Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan**

Menyadari bahwa kemampuan Sumberdaya Masyarakat yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sangat terbatas, maka guna mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan perikanan di Sulawesi Selatan sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah, swasta perikanan, dan masyarakat pelaku usaha perikanan. Dukungan tersebut, baik berupa saran dan koreksi untuk menjadi bahan penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022.

Perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerihintahan maupun dil luar pemerintahaan.

### **5.3. Rencana Tindak Lanjut**

Rencana kerja pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2022 diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemulihan perekonomian nasional dan daerah

serta pemeliharaan kesejahteraan masyarakat mendukung sasaran dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan RKPD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022. Dokumen Rencana Kerja OPD ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 oleh masing-masing unit kerja di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung Visi dan Misi pembangunan Sulawesi Selatan ke depan.

Kerjasama dengan stakeholder sangat diharapkan dapat memantapkan posisi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam membangun perikanan di Sulawesi Selatan dan Nasional, dalam hal Penghasil devisa, Penyerapan tenaga kerja dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan.